



GOVERNOR OF GORONTALO

GOVERNOR OF GORONTALO
REGULATION
NUMBER 10 YEAR 2026

ABOUT

AMENDMENT OF GOVERNOR OF GORONTALO REGULATION NUMBER 12 YEAR
2025 ABOUT REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN YEAR 2026

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang :
- a. that in connection with the determination of RPJMD Province Gorontalo Year 2025-2029, changes in policy assumptions financial region and framework of funding as well as plans program and priorities region that require adjustment back to Regulation Governor Gorontalo Number 12 Year 2025 About Regional Government Work Plan Year 2026;
 - b. that based on the provisions of Article 343 of the Minister of Regional Development Regulation Number 86 Year 2017 about the System of Planning, Control and Evaluation of Regional Development, System of Evaluation of Regional Development Plans and Regional Development Plans Long Term, Medium Term Regional Development, and Regional Development Plans Long Term, Medium Term Regional Development, and Regional Government Work Plan, changes in RKPD can be carried out if based on the results of evaluation of its implementation in the year running showing the existence of incompatibility with development conditions;
 - c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to establish Regulation Governor about the Amendment of Regulation Governor

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

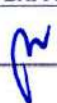
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Dilakukan penyesuaian :
- a. target terkait proyeksi indikator makro Provinsi Gorontalo Tahun 2026 serta indikator sasaran pembangunan daerah pada Bab IV;
 - b. terkait kebijakan keuangan daerah pada BAB III;
 - c. program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah yang baru sebagai implikasi atas kebijakan nasional dan karena adanya penyesuaian kebijakan keuangan daerah
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Juli 2026
GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026 NOMOR 10



Pemerintah
Provinsi Gorontalo

PERUBAHAN

RKPD

PROVINSI GORONTALO

2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA	5
BAB II EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026	1
2.1 GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH RKPD TAHUN 2026.....	1
2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAERAH BERUPA IKU DAN IKD	4
2.3 EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025.....	9
2.4 EVALUASI CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	11
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo.....	1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2025 dan 2026...	13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	17
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	19
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	1
4.1.1 Tujuan Pembangunan Daerah.....	1
4.1.2 Sasaran Pembangunan Daerah	4
4.1.3 Program Unggulan Pembangunan 2025-2029.....	6
4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	7
4.2.1 Isu Strategis Daerah	7

4.2.2	Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).....	16
4.2.3	Penelaahan Terhadap Isu Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.....	18
4.2.4	Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.....	18
4.2.5	Penelaahan Terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045...	19
4.2.6	Penelaahan Terhadap RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029..	19
4.3	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026.....	19
4.4	SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026.	19
4.5	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	34
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		1
BAB VI PENUTUP		1

DAFTAR TABEL

BAB II EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026	1
Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Kondisi sampai dengan : Triwulan II Tahun 2026.....	1
Tabel 2.2 Unsur Tema RKPD 2026.....	3
Tabel 2.3 Realisasi IKU dan IKD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	4
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, 2023-2025 (miliar rupiah) Triwulan I-2026	2
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2026	3
Tabel 3.3 Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), TW-I 2025, TW-IV 2025 dan TW I-2026	3
Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2023 – 2025	4
Tabel 3.5 IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Gorontalo Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025	4
Tabel 3.6 Perkembangan Gini Ratio Maret 2019 – September 2025	7
Tabel 3.7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo, Februari 2024 - Februari 2025	8
Tabel 3.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Menurut Wilayah, September 2024 – September 2025	10
Tabel 3.9 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2024 - September 2025.....	11
Tabel 3.10 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2026.....	13
Tabel 3.11 Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2025-2026.....	15
Tabel 3.12 Realisasi Pendapatan Daerah 2021 s/d 2025	18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
Tabel 4.1 Indikator dan Target Tujuan Pembangunan Provinsi Gorontalo.....	1
Tabel 4.2 Hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	17

Tabel 4.3 Unsur-unsur Tema RKPD Tahun 2026	20
Tabel 4.4 Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2026.....	21
Tabel 4.5 Indikator dan Target Sasaran 1	22
Tabel 4.6 Indikator dan Target Sasaran 2	25
Tabel 4.7 Indikator dan Target Sasaran 3	26
Tabel 4.8 Indikator dan Target Sasaran 4	27
Tabel 4.9 Indikator dan Target Sasaran 5	28
Tabel 4.10 Indikator dan Target Sasaran 6.....	29
Tabel 4.11 Indikator dan Target Sasaran 7.....	29
Tabel 4.12 Indikator dan Target Sasaran 8.....	30
Tabel 4.13 Indikator dan Target Sasaran 9.....	31
Tabel 4.14 Indikator dan Target Sasaran 10.....	32
Tabel 4.15 Indikator dan Target Sasaran 11.....	33
Tabel 4.16 Indikator dan Target Sasaran 12.....	34
Tabel 4.17 Program Prioritas Provinsi Tahun 2026	35
Tabel 4.18 Prioritas Nasional untuk Provinsi Gorontalo 2026	41
Tabel 4.19 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan RKP dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 beserta dukungan Program Prioritas Tahun 2026.....	43
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
Tabel 5.1 Rekapitulasi Perbandingan Pagu Indikatif OPD Tahun 2026.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025 – 2029. RKPD ini merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026, dengan tetap memedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, RKPD tahun 2026 sampai dengan satu semester berdasarkan hasil evaluasi, ditemui berbagai kondisi yang yang dijadikan dasar

pertimbangan perlunya melakukan perubahan atas dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2026, antara lain :

1. Pembaharuan RKPD berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, hal ini dikarenakan RKPD ditetapkan saat RPJMD masih dalam tahapan rancangan akhir;
2. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (2025) dan harus digunakan untuk tahun berjalan (2026);
4. Penambahan anggaran pada program dan kegiatan prioritas yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD 2026 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas dan target pencapaian target pembangunan Provinsi Gorontalo;
5. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini dilakukan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah dengan lebih efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 02);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 06);
21. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 20);
22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 34);
23. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPD Tahun 2026 Provinsi Gorontalo merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan Perubahan RKPD 2026 adalah sebagai berikut:

1. Adanya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2026, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2026.
2. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.
3. Menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4 Sistematika

Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2026, proses penyusunan kedudukan dokumen RKPD Perubahan tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD Perubahan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUPA-PPAS dan APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

BAB II EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Gambaran Umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026

Menjelaskan secara umum rencana kerja pembangunan Provinsi Gorontalo berdasarkan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah berupa IKU dan IKD

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Menjelaskan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2025.

2.4 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025 dan 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2026

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan, sasaran dan program unggulan Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II. Dikemukakan pula Aspek-Aspek yang perlu menjadi perhatian daerah, serta Isu pembangunan Nasional yang menjadi salah satu fokus pembangunan di daerah.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Memuat tentang tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2026.

4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

4.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dalam rangka menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Gambaran Umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. RKPD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui penguatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan pembangunan daerah telah memasuki tahap awal implementasi program dan kegiatan. Sebagian besar Perangkat Daerah telah melaksanakan proses perencanaan operasional, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar pencapaian target pembangunan pada triwulan berikutnya.

RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan tema pembangunan daerah yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan selama tahun berjalan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD

Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kondisi sampai dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.17.3.30.3.31.27.0000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	26,497,373,100.00	47.52	100	77,526,780,223.00	292.58
2	2.23.2.24.0.00.29.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8,827,269,238.00	18.85	6.6	5,236,644,351.00	59.32
3	3.25.0.00.0.00.30.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,602,084,637.00	50.27	35.45	12,028,137,762.00	58.38
4	4.01.0.00.0.00.48.0046	Biro Organisasi	4,582,284,112.00	11.17	54.14	2,612,224,973.00	57.01
5	4.01.0.00.0.00.48.0042	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19,336,046,102.00	62.5	72.27	10,992,352,585.00	56.85
6	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,958,571,429.00	60.42	78.36	5,485,184,962.00	55.08
7	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7,508,778,592.00	53.21	100	4,134,199,619.00	55.06
8	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	16,436,368,161.00	11.37	18.32	9,045,507,517.00	55.03
9	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	534,804,246,881.00	58.33	55.26	290,924,426,724.00	54.4
10	6.01.0.00.0.00.51.0000	Inspektorat	18,802,137,449.00	87.28	37.57	10,149,855,796.00	53.98

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	4.01.0.00.0.00.48.0045	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6,834,177,951.00	9.38	25.52	3,646,092,010.00	53.35
12	5.01.5.05.0.00.52.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15,451,266,269.00	31.75	27.71	8,142,259,122.00	52.7
13	1.05.0.00.0.00.10.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	10,038,742,027.00	42.67	22.31	5,288,217,642.00	52.68
14	2.16.2.20.2.21.26.0000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	12,970,800,814.00	26.4	100	6,790,927,185.00	52.36
15	1.05.0.00.0.00.11.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,112,696,689.00	59.5	64.82	4,730,134,201.00	51.91
16	1.06.2.12.0.00.13.0000	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,266,289,112.00	100	43.21	10,831,133,751.00	50.93
17	5.02.0.00.0.00.53.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	224,525,488,990.00	43.17	66.54	112,913,434,631.00	50.29
18	5.03.5.04.0.00.56.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19,583,978,136.00	95.02	54.61	9,775,466,060.00	49.92
19	4.01.0.00.0.00.48.0043	Biro Hukum	4,570,998,794.00	30	33.67	2,239,785,162.00	49
20	5.02.0.00.0.00.30.0000	Badan Pendapatan Daerah	38,108,398,341.00	50.93	50.29	18,653,965,644.00	48.95
21	2.09.3.27.0.00.16.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	51,201,027,116.00	31.66	51.92	25,023,175,631.00	48.87
22	4.01.0.00.0.00.48.0044	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4,513,082,395.00	25	19.13	2,177,363,198.00	48.25
23	4.01.0.00.0.00.48.0047	Biro Umum	38,544,518,193.00	50	26.51	18,221,416,728.00	47.27
24	4.02.0.00.0.00.50.0000	Sekretariat DPRD	83,609,985,816.00	0.42	50.19	38,612,348,266.00	46.18
25	2.11.3.28.0.00.17.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35,137,207,644.00	19.28	47.55	15,926,336,810.00	45.33
26	1.03.1.04.2.10.05.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	68,395,770,540.00	17.63	25.34	29,728,315,181.00	43.47
27	3.26.2.19.0.00.33.0000	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga	18,754,521,683.00	33.51	41.44	7,885,161,819.00	42.04
28	1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	222,639,485,169.00	42.93	41.44	91,821,469,650.00	41.24
29	3.27.0.00.0.00.36.0000	Dinas Peternakan dan Perkebunan	15,222,797,622.00	9.17	79.51	6,184,071,238.00	40.62
30	2.15.0.00.0.00.25.0000	Dinas Perhubungan	16,501,730,499.00	100	64.65	6,672,596,701.00	40.44
31	2.08.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	11,818,151,439.00	30.4	43.6	4,178,456,420.00	35.36
32	4.01.5.07.0.00.49.0000	Badan Penghubung	7,408,500,000.00	100	100	3,158,971.00	0.04
33	2.09.0.00.0.00.15.0001	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	375,651,179.00	0	0	0.00	0
34	2.09.3.27.0.00.16.0001	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	0.00	0	0	0.00	0
35	2.09.3.27.0.00.16.0002	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	1,453,508,500.00	0	0	0.00	0
36	2.09.3.27.0.00.16.0003	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	1,250,148,900.00	0	0	0.00	0
37	2.09.3.27.0.00.16.0004	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	404,954,500.00	0	0	0.00	0
38	3.25.0.00.0.00.30.0001	UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)	675,580,868.00	12.5	0	0.00	0
39	3.25.0.00.0.00.30.0002	UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)	1,505,218,856.00	12.52	0	0.00	0
40	3.25.0.00.0.00.30.0003	UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)	926,121,665.00	12.52	0	0.00	0
41	3.25.0.00.0.00.30.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma (PPI Gentuma)	404,009,000.00	12.52	0	0.00	0
42	3.25.0.00.0.00.30.0005	Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)	275,513,400.00	62.5	0	0.00	0

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
43	3.27.0.00.0.00.35.0001	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	0.00	0	0	392,659,047.00	0
44	3.27.0.00.0.00.35.0002	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	0.00	0	0	453,240,076.00	0
45	3.27.0.00.0.00.35.0003	UPTD Laboratorium Veteriner	0.00	0	0	0.00	0
46	3.27.0.00.0.00.35.0004	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	0.00	0	0	66,684,184.00	0
47	3.27.0.00.0.00.35.0005	UPTD Balai Perbibitan Ternak	0.00	0	0	0.00	0
48	3.27.0.00.0.00.36.0001	UPTD Laboratorium Veteriner	531,089,700.00	0	0	0.00	0
49	3.27.0.00.0.00.36.0002	UPTD Balai Perbibitan Ternak	2,818,470,600.00	0	0	0.00	0
50	5.02.0.00.0.00.30.0001	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo	1,417,624,591.00	0	0	0.00	0
51	5.02.0.00.0.00.30.0002	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	1,463,598,400.00	25.47	0	0.00	0
52	5.02.0.00.0.00.30.0003	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo	940,234,141.00	25.47	0	0.00	0
53	5.02.0.00.0.00.30.0004	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango	919,745,009.00	25.47	0	0.00	0
54	5.02.0.00.0.00.30.0005	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	1,128,069,800.00	25.47	0	0.00	0
55	5.02.0.00.0.00.30.0006	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato	1,252,350,132.00	25.47	0	0.00	0
56	5.02.0.00.0.00.53.0001	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo	0.00	0	47.79	525,201,375.00	0
57	5.02.0.00.0.00.53.0002	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	0.00	0	47.79	562,757,609.00	0
58	5.02.0.00.0.00.53.0003	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo	0.00	0	47.79	229,662,105.00	0
59	5.02.0.00.0.00.53.0004	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango	0.00	0	100	352,459,919.00	0
60	5.02.0.00.0.00.53.0005	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	0.00	0	47.79	294,972,232.00	0
61	5.02.0.00.0.00.53.0006	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato	0.00	0	47.79	438,987,932.00	0
		JUMLAH	1,621,306,664,181.00	34.37	35.94	860,897,225,012.00	53.1

”Peningkatan Ekonomi yang Inklusif melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Layanan Dasar yang didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas”

Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan. Prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui berbagai intervensi pembangunan yang diarahkan untuk:

Tabel 2.2
Unsur Tema RKPD 2026

Peningkatan Ekonomi yang Inklusif	<div>1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan</div> <div>2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian</div>
--	--

Optimalisasi Sumber Daya Alam	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar
Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya derajat kesehatan 2. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan 3. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama 4. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat 5. Meningkatnya budaya literasi Masyarakat 6. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa 7. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah 8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Seluruh prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan melalui sinergi program antar-Perangkat Daerah, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Daerah berupa IKU dan IKD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya.

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025, terdapat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, dengan target dan realisasi kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi IKU dan IKD Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		% Realisasi
				Target	Realisasi	
Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing dan Peningkatan Pendapatan perkapita daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.54	5.71	103.07
		PDRB perkapita	Juta Rupiah	47.84	47.48	99.25

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		% Realisasi
				Target	Realisasi	
		Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3.63	3.58	98.62
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	53.8	N/A	N/A
	Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0.25	0.248	99.2
		Persentase Desa Mandiri (%)	%	28.61	39.26	137.22
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	29.88	27,32	91,43
		Indeks Transformasi Digital	%	54.05	N/A	N/A
	Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
		Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	%	8.21	0.39	4.75
		Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	%	0.64	0.31	48.44
		Rasio Kewirausahaan Provinsi	Rasio	3.62	2.43	67.13
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio	0.92	0.40	43.48
		Persentase Lapangan Kerja yang Baik :				
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,07 – 3,19	3.23	98.76
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	38	38.86	102.26
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56.37	55.65	98.72
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4.16	4.14	99.52
		Pengembangan Pariwisata :				

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		% Realisasi
				Target	Realisasi	
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	Ribu orang	5,000	5,294	105.88
		Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Bintang	%	57.09	38,47	67,38
		Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Non-Bintang	%	18.27	14,51	79,42
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	4.46	4.89	109.64
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	29.38	29,59	100,71
	Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air.	Ketahanan Energi, Air dan Pangan				
		Konsumsi Listrik per kapita (KWH per Kapita)	KWH/kapita	1,200	780	65%
		Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	SBM/Rp Milyar	71	N/A	N/A
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	15,50	15.32	84,03
	Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0.80	0.73	91.25
		Tingkat Inflasi (%)	%	2,4 – 2,8	2.52	100
		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	12.67	N/A	N/A
		Nilai Transaksi Saham Perkapita (Ribu Rupiah)	%	613,765	N/A	N/A
		Total Kredit/PDRB (%)	%	35.48	N/A	N/A
		Indeks Inklusi Keuangan	%	91.3	N/A	N/A
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	61.46	51.72	84.15
Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan	%	13.58	12.62	107.61

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		% Realisasi
				Target	Realisasi	
		Rasio Gini	Rasio	0.408	0.383	106.53
	Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	62	53.77	86.72
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	16	N/A	N/A
Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.50	N/A	N/A
Sumber Daya Manusia						
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.71	72.62	99.87
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.58	71.06	99.27
		Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	120.75	150.7	80.12
		Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	22.14	23,80 (SSGI-2024)	92.03
		Penanganan Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):				
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	95.00	88	92.63
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	95.00	88	92.63
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan aktif (%)	%	80	100.98	126.22
	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Hasil Pembelajaran				

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		% Realisasi
				Target	Realisasi	
		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional:				
		- Literasi Membaca	%	0,00 – 16,67	62.29	100
		- Numerasi	%	0,00 – 16,67	58.68	100
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk :				
		- Literasi Membaca	%	25,04-27,54	56-59	100
		- Numerasi	%	19,56-22,06	51-53	100
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12.29%	8,20	66,72
	Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	73.12	77.49	105.97
	Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	80.03	70,11 (2024)	87.60
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.34	0,365 (2024)	93.15
		Jumlah perolehan medali pada Kompetisi Nasional	Medali	5	20	100
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Intensitas Emisi GRK	%	59.98	N/A	N/A
	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	Indeks	161.23	164.37	98.08
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
		- Kumulatif	%	21.05	N/A	N/A
		- Tahunan	%	35.10	N/A	N/A

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		% Realisasi
				Target	Realisasi	
		Pengelolaan Sampah				
		- Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	16	N/A	N/A
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	24	N/A	N/A
		- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4.65	N/A	N/A
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.524	N/A	N/A
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	84,04	107.74
	Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87	96.78	111.24
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40	55.01	137.52
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.12	4,48 (Terbaik 10 Nasional)	109.26

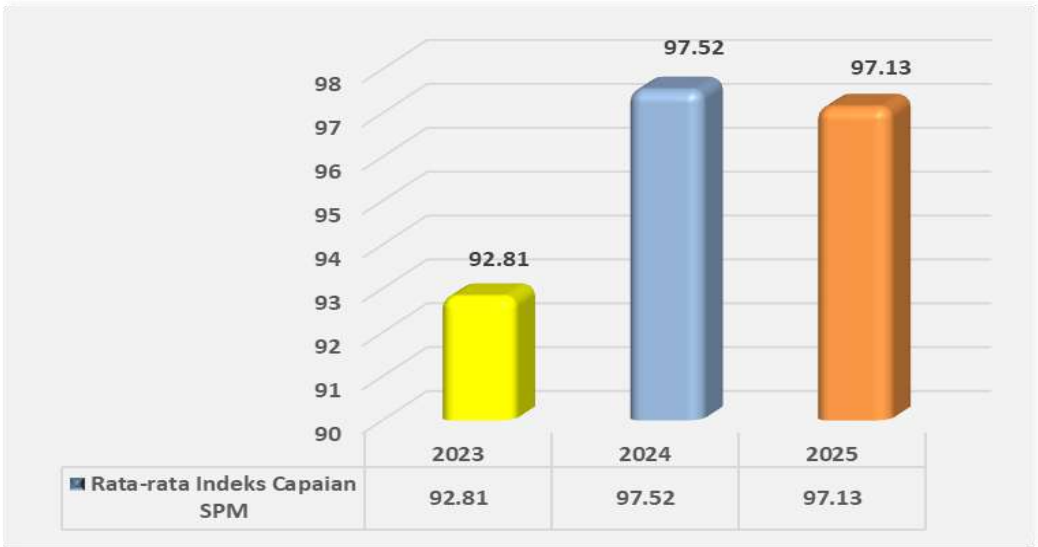
2.3. Evaluasi Capaian SPM tahun 2023-2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang hingga saat ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan pemenuhan SPM. Regulasi ini mengatur tahapan penerapan SPM secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebesar 97.13%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 97.52%. Dilihat dari per bidang pada tahun 2025, capaian tertinggi berada pada SPM Bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 100%, diikuti Bidang Trantibumlinmas

sebesar 99.18%, Bidang Sosial sebesar 97.35% dan Bidang Pendidikan sebesar 86.22%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar bidang SPM telah berada pada capaian yang relatif tinggi, terutama Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kinerja pada Bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat digambarkan pada grafik 2.1 dan grafik 2.2 berikut :

Grafik. 2.1
Capaian SPM Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2025



Sumber : Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo, 2026

Grafik. 2.2
Capaian SPM Provinsi Gorontalo Per Bidang
Tahun 2025



Sumber : Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo, 2026

2.4. Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Evaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana termuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan II sebagaimana tabel di bawah ini :

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini menguraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata-mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2026 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024, proyeksi Tahun 2025 dan 2026. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo 2024, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026. Pada akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Gorontalo triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 7,68 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,34 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 21,77 persen. Perekonomian Gorontalo berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp15.789,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9.100,51 miliar

Ekonomi Gorontalo triwulan I-2026 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 1,59 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 8,61 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 29,34 persen. Struktur ekonomi Gorontalo triwulan I-2026 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 36,46 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,48 persen.

Kondisi tersebut memberikan optimisme sekaligus tantangan bagi pembangunan Gorontalo. Optimismenya adalah semakin kuatnya momentum pertumbuhan, khususnya melalui ekspor dan penguatan aktivitas produksi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Oleh karena itu, agenda pembangunan ke depan perlu diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui hilirisasi sektor pertanian, penguatan industri pengolahan, peningkatan daya saing ekspor, penguatan konektivitas dan logistik, serta optimalisasi keterkaitan antara investasi, tenaga kerja lokal dan UMKM.

Tabel 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, 2023-2025 (miliar rupiah) Triwulan I-2026

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triwulan I-2025	Triwulan IV-2025	Triwulan I-2026	Triwulan I-2025	Triwulan IV-2025	Triwulan I-2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.317,67	5.466,87	5.756,65	3.041,65	3.042,97	3.166,88
B.	Pertambangan dan Penggalian	142,83	245,02	290,38	92,36	119,12	121,30
C.	Industri Pengolahan	664,29	801,19	874,10	372,93	444,13	482,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,72	7,11	7,20	7,65	7,89	7,95
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,72	8,51	8,45	4,85	5,27	5,16
F.	Konstruksi	1.528,97	1.757,62	1.651,91	902,85	1.026,68	951,94
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.078,70	2.262,31	2.371,17	1.177,93	1.241,38	1.291,12
H.	Transportasi dan Pergudangan	836,37	953,81	968,54	478,41	542,75	546,60
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,08	355,93	359,08	200,55	226,94	227,60
J.	Informasi dan Komunikasi	381,81	396,09	397,46	309,74	326,07	326,69
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	538,31	654,79	627,00	304,08	363,17	344,90
L.	Real Estat	221,13	247,07	247,84	146,49	161,64	161,93
M,N.	Jasa Perusahaan	11,49	11,46	11,64	7,08	7,03	7,07
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	795,66	794,56	847,34	580,13	587,13	604,20
P.	Jasa Pendidikan	588,83	591,37	603,87	371,73	370,11	369,73
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	523,77	582,77	580,76	327,24	360,57	356,28
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	180,81	181,13	186,31	125,68	125,07	128,81
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		14.136,14	15.317,63	15.789,70	8.451,33	8.957,91	9.100,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2026

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2026

Lapangan Usaha	Triwulan I-2026 terhadap Triwulan IV-2025 (q-to-q)	Triwulan I-2026 terhadap Triwulan I-2025 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2026 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,07	4,12	1,48
B. Pertambangan dan Penggalian	1,84	31,34	0,34
C. Industri Pengolahan	8,61	29,34	1,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	3,92	~0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-2,09	6,40	~0
F. Konstruksi	-7,28	5,44	0,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,01	9,61	1,34
H. Transportasi dan Pergudangan	0,71	14,25	0,81
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	13,49	0,32
J. Informasi dan Komunikasi	0,19	5,47	0,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,03	13,42	0,48
L. Real Estat	0,18	10,54	0,18
M,N. Jasa Perusahaan	0,62	-0,09	~0
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	2,91	4,15	0,28
P. Jasa Pendidikan	-0,10	-0,54	-0,02
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,19	8,87	0,34
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,99	2,49	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,59	7,68	7,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2026

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), TW-I 2025, TW-IV 2025 dan TW I-2026

Lapangan Usaha	Triwulan I-2025	Triwulan IV-2025	Triwulan I-2026
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,62	35,69	36,46
B. Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,60	1,84
C. Industri Pengolahan	4,70	5,23	5,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,05
F. Konstruksi	10,82	11,47	10,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,70	14,77	15,02
H. Transportasi dan Pergudangan	5,92	6,23	6,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,20	2,32	2,27
J. Informasi dan Komunikasi	2,70	2,59	2,52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,81	4,27	3,97
L. Real Estat	1,56	1,61	1,57
M,N. Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jami- nan Sosial Wajib	5,63	5,19	5,37
P. Jasa Pendidikan	4,17	3,86	3,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,71	3,80	3,68
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,28	1,18	1,18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2026

PDRB Per Kapita

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data

pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.4 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.4

PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2023 - 2025

PDRB Perkapita ADHB	2023	2024	2025
Nilai (Rupiah)	42.340.504	44.432.945	47.482.365
Nilai (US\$)	2.778	2.803	2.770

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2026

Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Desember 2025 terjadi deflasi *year-on-year (y-on-y)* Provinsi Gorontalo sebesar 0,79 persen dengan IHK sebesar 106,60. Kota Gorontalo mengalami *deflasi year-on-year (y-on-y)* sebesar 1,10% dengan IHK sebesar 105,57 dan Kabupaten Gorontalo mengalami deflasi *year-on-year (y-on-y)* sebesar 0,53% dengan IHK sebesar 107,90.

Tabel 3.5

IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Gorontalo Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2024	IHK November 2025	IHK Desember 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	106,60	108,34	109,29	0,88	2,52	2,52	0,88	2,52
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,81	113,13	115,66	2,24	4,38	4,38	0,80	1,56
Pakaian dan Alas Kaki	104,01	104,44	104,45	0,01	0,42	0,42	~0	0,03
Perumahan, Air, Listrik,	102,12	102,72	102,74	0,02	0,61	0,61	~0	0,09

dan Bahan Bakar Rumah Tangga								
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	98,28	95,65	95,36	-0,30	-2,97	-2,97	-0,01	-0,15
Kesehatan	103,77	103,65	103,65	~0	-0,12	-0,12	~0	~0
Transportasi	109,30	111,09	111,00	-0,08	1,56	1,56	-0,01	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,19	98,61	98,61	~0	-1,58	-1,58	~0	-0,07
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,44	101,21	102,03	0,81	-0,40	-0,40	0,02	-0,02
Pendidikan	101,96	104,03	104,03	~0	2,03	2,03	~0	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	107,37	109,47	110,08	0,56	2,52	2,52	0,04	0,17
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	109,11	118,29	118,91	0,52	8,98	8,98	0,04	0,67

Catatan:
1) Persentase perubahan IHK November 2025 terhadap IHK Oktober 2025.
2) Persentase perubahan IHK November 2025 terhadap IHK Desember 2024.
3) Persentase perubahan IHK November 2025 terhadap IHK November 2024.
~0: Data sangat kecil/mendekati nol
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2026
Pada Desember 2025 Provinsi Gorontalo mengalami inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 2,52 persen. Kota Gorontalo mengalami inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 2,50 persen dan Kabupaten Gorontalo mengalami inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 2,54 persen. Inflasi y-on-y Provinsi Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,98 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,52 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,03 persen; kelompok transportasi sebesar 1,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen. Empat kelompok pengeluaran mengalami deflasi y-on-y yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,97 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,40 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen.

Perkembangan inflasi di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) pada akhir periode berada pada kisaran ±2,5 persen. Capaian ini mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi tersebut tidak terlepas dari efektivitas pengendalian

inflasi daerah melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta dukungan kebijakan stabilisasi pasokan dan distribusi komoditas strategis, khususnya bahan pangan.

Pada awal tahun 2025, dinamika inflasi di Gorontalo diwarnai oleh tekanan deflasi yang cukup dalam. Hal ini tercermin dari capaian inflasi year-on-year yang berada pada zona negatif pada Januari hingga Februari 2025. Deflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, termasuk perumahan, energi, serta komoditas pangan tertentu yang mengalami surplus pasokan. Selain itu, faktor musiman pasca periode hari besar keagamaan nasional serta relatif terbatasnya permintaan masyarakat turut memperkuat tekanan deflasi pada periode awal tahun.

Memasuki pertengahan tahun, inflasi mulai mengalami normalisasi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Kenaikan inflasi secara bertahap terjadi sejak triwulan II hingga mencapai puncaknya pada sekitar pertengahan tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan domestik, perbaikan daya beli, serta adanya tekanan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai komponen utama inflasi di daerah. Selain itu, kelompok jasa seperti restoran dan perawatan pribadi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada triwulan IV tahun 2025, inflasi kembali menunjukkan tren stabilisasi pada kisaran 2–2,5 persen. Meskipun terjadi fluktuasi bulanan, termasuk deflasi pada bulan Desember, secara umum tekanan harga dapat dikendalikan dengan baik. Deflasi pada akhir tahun terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas hortikultura dan beberapa bahan pangan lainnya yang mengalami peningkatan pasokan. Stabilitas ini juga mencerminkan efektivitas langkah-langkah intervensi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang.

Secara struktural, inflasi di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2025 masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki volatilitas tinggi. Ketergantungan terhadap pasokan pangan lokal serta sensitivitas terhadap faktor musiman menjadikan kelompok ini sebagai determinan utama inflasi daerah. Di sisi lain, beberapa kelompok pengeluaran seperti informasi dan komunikasi, kesehatan, serta perlengkapan rumah tangga cenderung memberikan kontribusi deflasi, sehingga berperan sebagai faktor penahan laju inflasi secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kondisi inflasi Gorontalo tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai stabil dan terkendali, namun tetap menghadapi tantangan struktural terutama pada pengendalian inflasi pangan. Oleh karena itu, dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah ke depan, diperlukan penguatan kebijakan stabilisasi harga melalui peningkatan ketahanan pangan daerah, penguatan sistem logistik dan distribusi, serta optimalisasi peran TPID dalam menjaga kesinambungan pengendalian inflasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau ***Gini Ratio*** telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilai Gini Ratio Gorontalo selama periode Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk

mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan pemerataan yang semakin baik, sedangkan mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2025, Rasio Gini Provinsi Gorontalo tercatat berada pada kisaran 0,383 (kategori ketimpangan sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Gorontalo masih menghadapi tantangan dalam pemerataan, meskipun relatif lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi di tingkat nasional.

Secara tren, perkembangan Rasio Gini Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil dengan fluktuasi terbatas, yang mengindikasikan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mulai memberikan dampak, namun belum cukup signifikan dalam menurunkan ketimpangan secara struktural.

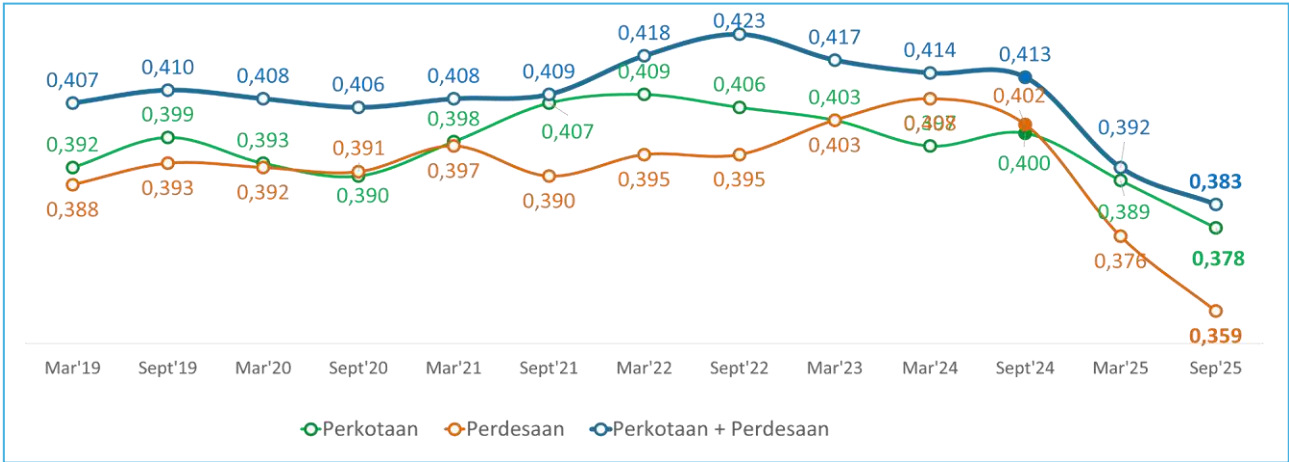
Ketimpangan pendapatan di Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, khususnya pertanian dengan produktivitas relatif rendah.
- Perbedaan akses terhadap peluang ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
- Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, yang berdampak pada rendahnya mobilitas ekonomi masyarakat.
- Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, sehingga distribusi pendapatan belum merata.

Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah, kondisi Rasio Gini tersebut menuntut penguatan intervensi yang lebih terarah, antara lain melalui:

- Peningkatan nilai tambah sektor unggulan berbasis lokal.
- Perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Penguatan program perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah inti.

Tabel 3.6



Perkembangan Gini Ratio Maret 2019 – September 2025

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pengangguran,

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Gorontalo mencapai sekitar 946,3 ribu orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 633,3 ribu orang. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk bekerja dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pertumbuhannya relatif terbatas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 tercatat sebesar 69,29 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk usia kerja belum sepenuhnya terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik karena faktor pendidikan, pilihan untuk tidak bekerja, maupun keterbatasan peluang kerja yang tersedia. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,42 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,13 persen. Pada periode Februari 2025, TPT tercatat sebesar 3,12 persen, yang menunjukkan adanya tren peningkatan pengangguran secara tahunan. Meskipun demikian, angka TPT Gorontalo masih tergolong relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Dari sisi struktur ketenagakerjaan, proporsi pekerja di sektor formal pada tahun 2025 mencapai 38,86 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pekerjaan, meskipun mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal. Di sisi lain, persentase setengah pengangguran mengalami penurunan, sementara pekerja paruh waktu menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan adanya pergeseran pola kerja di masyarakat.

Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dengan produktivitas relatif rendah;
- Keterbatasan penciptaan lapangan kerja formal;
- Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch);
- Tingginya pengangguran pada kelompok pendidikan menengah tertentu.

Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi ini menuntut penguatan kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan kewirausahaan berbasis potensi lokal.

Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.7
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo, Februari 2024 - Februari 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan	
						Ags 2025–Nov 2025	
	orang	orang	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	927.022	932.926	940.437	946.299	949.654	3.355	0,35

Angkatan Kerja	653.381	652.588	634.987	655.681	672.391	16.710	2,55
– Bekerja	633.463	632.184	615.170	633.263	650.658	17.395	2,75
– Pengangguran	19.918	20.404	19.817	22.418	21.733	-685	-3,06
Bukan Angkatan Kerja	273.641	280.338	305.450	290.618	277.263	-13.355	-4,60
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,48	69,95	67,52	69,29	70,80	1,51	
– Laki-laki	87,15	84,50	82,66	85,30	85,81	0,51	
– Perempuan	53,63	55,23	52,23	53,12	55,65	2,53	

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Kemiskinan, Pada tahun 2025, kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada Maret 2025 tercatat sebesar 13,24 persen, menurun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 13,87 persen. Jumlah penduduk miskin pada periode ini mencapai sekitar 162,74 ribu jiwa, berkurang sekitar 7,29 ribu jiwa dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, pada September 2025, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 12,62 persen, atau turun 0,62 persen poin dibandingkan Maret 2025. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sekitar 155,76 ribu jiwa, menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Dari sisi spasial, kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 4,68 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 20,80 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa kantong-kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, terutama yang bergantung pada sektor primer dengan produktivitas relatif rendah.

Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan naiknya standar kebutuhan hidup minimum masyarakat. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar sekitar Rp495.576 per kapita per bulan, dan meningkat menjadi sekitar Rp519.640 per kapita per bulan pada September 2025.

Secara umum, tren penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil;
- Peningkatan program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah;
- Perbaikan kondisi ketenagakerjaan, meskipun masih didominasi sektor informal;
- Penguatan intervensi pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian, terutama tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, serta rendahnya produktivitas sektor unggulan.

Tabel 3.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Menurut Wilayah, September 2024 – September 2025

Wilayah/Periode	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2024	4,99	28,49
Maret 2025	4,68	27,01
September 2025	4,46	25,88
Perdesaan		
September 2024	21,62	141,54
Maret 2025	20,80	135,73
September 2025	19,86	129,88
Perkotaan+Perdesaan		
September 2024	13,87	170,03
Maret 2025	13,24	162,74
September 2025	12,62	155,76

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Secara umum, Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2025 mencapai 155,76 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 6,98 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 12,62 persen, menurun 0,62 persen poin terhadap Maret 2025.

Menurut wilayah tempat tinggal, pada September 2025 dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 1,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 5,8 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 4,68 persen menjadi 4,46 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 20,80 persen menjadi 19,86 persen.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2025 mencapai 155,76 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 6,98 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 12,62 persen, menurun 0,62 persen poin terhadap Maret 2025.

Menurut wilayah tempat tinggal, pada September 2025 dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 1,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 5,8 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 4,68 persen menjadi 4,46 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 20,80 persen menjadi 19,86 persen.

Tabel 3.9

Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2024 - September 2025

Wilayah/Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2024	372.700	122.625	495.325
Maret 2025	378.641	125.213	503.854
September 2025	395.848	131.082	526.930
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	6,21	6,90	6,38
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	4,54	4,69	4,58
Perdesaan			
September 2024	385.233	95.074	480.307
Maret 2025	389.748	97.850	487.598
September 2025	411.927	100.211	512.138
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	6,93	5,40	6,63
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	5,69	2,41	5,03
Perkotaan+Perdesaan			
September 2024	379.715	107.863	487.578
Maret 2025	384.890	110.686	495.576
September 2025	404.784	114.856	519.640
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	6,60	6,48	6,58
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	5,17	3,77	4,86

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

maka Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2025 tercantum pada tabel 3.8 dibawah ini.

Dari perspektif struktur ekonomi, MBG menciptakan linkage yang kuat antara sektor pertanian dengan sektor jasa dan UMKM. Di Gorontalo, program ini melibatkan sedikitnya 86 UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan, ditambah pelaku distribusi dan jasa transportasi . Artinya, permintaan yang sebelumnya bersifat sporadis kini menjadi demand yang terjamin (captive market) karena kebutuhan dapur MBG berlangsung harian. Ini mengurangi risiko pasar bagi petani dan pelaku usaha kecil, sekaligus mendorong stabilitas produksi komoditas lokal seperti beras, ikan, telur, dan sayuran.

Lebih dalam lagi, MBG berperan sebagai mesin pencipta lapangan kerja baru berbasis layanan publik. Dengan operasional puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekitar 1.000 tenaga kerja/relawan yang terlibat, terjadi ekspansi sektor informal dan semi-formal di bidang

katering, logistik, dan pengolahan pangan . Ini penting bagi Gorontalo yang masih menghadapi keterbatasan industrialisasi, karena MBG secara efektif menciptakan employment buffer tanpa harus menunggu investasi besar masuk.

Namun insight yang paling strategis adalah bahwa MBG membentuk ekosistem ekonomi baru berbasis gizi (nutrition-driven economy). Pemerintah daerah sendiri menilai program ini bukan sekadar intervensi sosial, tetapi telah menjadi “penyelamat ekonomi daerah” karena efek berantainya menjangkau berbagai sektor . Dalam konteks ini, konsumsi pemerintah (government consumption) berubah menjadi instrumen penggerak ekonomi wilayah, terutama di daerah dengan basis ekonomi primer seperti Gorontalo.

Di sisi lain, terdapat dimensi risiko yang perlu dikelola secara serius agar dampak ekonomi MBG tetap berkelanjutan. Secara nasional, program ini menghadapi tantangan tata kelola seperti kualitas distribusi, standar keamanan pangan, dan efisiensi anggaran . Jika isu-isu ini tidak ditangani, maka efek positif ekonomi bisa tereduksi oleh biaya sosial dan reputasi. Oleh karena itu, kunci optimalisasi MBG di Gorontalo ke depan adalah memperkuat governance, integrasi dengan rantai pasok lokal, serta mendorong hilirisasi pangan agar dampak ekonominya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga struktural.

Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, perekonomian Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Selain itu, keterbatasan infrastruktur konektivitas dan logistik, rendahnya tingkat hilirisasi produk, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing daerah. Permasalahan ini berimplikasi pada belum optimalnya transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih berimbang.

Dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo difokuskan pada transformasi struktural ekonomi daerah. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan sektor industri pengolahan berbasis potensi lokal, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Jika dikaitkan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo, maka pertumbuhan ekonomi 2025 tidak bisa lagi dilihat semata sebagai fenomena makro (PDRB), tetapi mulai bergeser menjadi growth dengan efek multiplikatif berbasis intervensi sosial. MBG pada dasarnya berfungsi sebagai fiscal injection langsung ke ekonomi lokal melalui belanja pemerintah yang terdistribusi hingga level mikro. Dengan realisasi anggaran sekitar Rp63–64 miliar yang beredar di daerah, program ini secara nyata meningkatkan likuiditas ekonomi lokal, terutama di sektor pangan dan jasa pendukung .

Tabel 3.10
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2026

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,74
2.	Inflasi	2 – 3
3.	Tingkat kemiskinan	12,46
4.	Tingkat pengangguran terbuka	3,01
5.	Indeks Gini	0,378
6.	IPM	73,31

Sumber : Tim KEMD Bappeda Provinsi Gorontalo, 2026

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2025 DAN TAHUN 2026

Global, Pertumbuhan Ekonomi Global sesuai dengan proyeksi Bank Dunia akan menempati angka 2,7% pada tahun 2026 spesifik untuk Pertumbuhan Ekonomi di negara – negara berkembang diperkirakan akan stabil pada kisaran 4% selama dua tahun ke depan. Faktor konsumsi Batubara global akan mulai menyusut pada tahun 2025 dan 2026 yang sebagian besar permintaannya oleh negara AS, Eropa dan China disebabkan oleh meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan gas alam.

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang berjudul Global Economic Prospects pada Januari 2025 menunjukkan bahwa ekspansi global yang moderat dan luas pada 2025-2026, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,7% per tahun, seiring dengan meningkatnya perdagangan dan investasi. Pertumbuhan global mulai stabil seiring dengan inflasi yang kembali mendekati target dan pelonggaran moneter yang mendukung aktivitas di negara-negara maju serta negara-negara pasar berkembang dan berkembang (EMDEs).

Kondisi keuangan global sedikit mereda secara keseluruhan sejak pertengahan 2024, terutama karena dimulainya pelonggaran moneter di Amerika Serikat dan meningkatnya selera risiko secara umum. Suku bunga kebijakan di negara-negara maju diperkirakan akan sedikit menurun lebih lanjut tahun ini, tetapi tetap jauh di atas tingkat yang sangat rendah pada 2010-an. Beban layanan utang yang terus meningkat tetap menjadi hambatan besar bagi aktivitas ekonomi di negara-negara dengan kerentanan keuangan yang tinggi, terutama di banyak negara berpenghasilan rendah (LICs). Di antara negara-negara berpenghasilan menengah dengan peringkat kredit yang lemah, spread utang negara telah mengalami normalisasi secara substansial tahun lalu, meskipun biaya pinjaman tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2010-an.

Pelemahan jangka panjang dalam dinamika ekonomi juga tercermin dalam ukuran pertumbuhan potensial: secara keseluruhan, pertumbuhan potensial global diperkirakan telah menurun sekitar sepertiga sejak tahun 2000-an. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada dunia, melainkan juga pada Emerging market and developing economies (EMDE) maupun East Asia and Pacific.

Setelah turun menjadi 4,1% tahun lalu, pertumbuhan di negara-negara pasar berkembang dan berkembang (EMDEs) diproyeksikan akan tetap berada di kisaran tersebut selama 2025-2026, sejalan dengan perkiraan pertumbuhan potensial. Perlambatan aktivitas di China diperkirakan akan sebagian besar diimbangi oleh menguatnya pertumbuhan di negara-negara EMDE lainnya, meskipun dengan variasi antar wilayah.

Ekonomi Nasional,

Tahun 2025 merupakan periode transisi baik dari segi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada di Pemerintahan baik pusat dan daerah, dimana banyak alokasi anggaran yang menjadi refocusing termasuk dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang sebagian besar menjadi komponen utama penyusun APBD. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) praktis membutuhkan sumber dana yang besar, mengingat kebijakan ini ditargetkan mencakup seluruh siswa di tingkatan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjadi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dari semula 71 Trilyun yang dianggarkan untuk Tahun 2025, mengalami kenaikan hampir 140% menjadi 170 Trilyun yang dianggarkan Pemerintah Pusat. Komponen TKD yang menjadi refocusing antara lain kebijakan Dana Alokasi Khusus pada bidang selain Pendidikan dan Kesehatan, sehingga bidang lainnya seperti jalan, irigasi, pertanian dan kelautan perikanan tidak mendapatkan alokasi dana tersebut. Di tengah berbagai dinamika kebijakan Pemerintah Pusat, Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2025 dan 2026. Angka ini menunjukkan kestabilan meski di tengah perlambatan pertumbuhan global yang diperkirakan berada di angka 2,7% pada periode yang sama.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025, Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya. Selain beberapa hal di atas, ada faktor lain yang perlu diperhatikan seperti faktor eksternal ketegangan geopolitik antara Amerika dan China, serta dampak perubahan iklim tetap menjadi ancaman yang perlu diantisipasi serta faktor inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan pelonggaran kebijakan moneter yang lebih lambat dan bencana alam menimbulkan risiko penurunan lebih lanjut.

Sedangkan jika merujuk pada Bank Indonesia, maka Ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8 – 5,6% dengan inflasi yang terkendali di rentang 2,5±1% dengan upaya penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Faktor pendukung termasuk peningkatan permintaan domestik, kebijakan fiskal yang konsisten, dan pertumbuhan perdagangan yang tetap stabil. Pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah reformasi yang mencakup liberalisasi perdagangan, stabilisasi makroekonomi, dan reformasi perusahaan publik membantu mengintegrasikan Indonesia ke dalam ekonomi global

Ekonomi Gorontalo,

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2024 didorong oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan, seiring dengan target produksi komoditas utama yang mengalami peningkatan meski dalam jumlah yang terbatas. Sementara itu lapangan usaha

utama lainnya seperti konsumsi domestik tumbuh positif dan menjadi menjadi penopang perekonomian daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari tahapan Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 yang mengusung tagline Gorontalo Maju dan Sejahtera dengan 5 Program Unggulan, yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia, UMKM, Agro Maritim, Pariwisata dan Infrastruktur. Meskipun dengan berbagai keterbatasan seperti pemberlakuan kebijakan efisiensi Belanja Pemerintah yang berpengaruh pada komponen dana TKD seperti DAU dan DAK, agenda Pembangunan di Provinsi Gorontalo tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditentukan.

Dari hasil analisis *existing* dan *forecasting* pada tahun 2025, pada skenario low Pertumbuhan Ekonomi berada pada angka 4,20%, moderate 5,54% dan high pada capaian 7,04%. Sedangkan untuk tahun 2026 pada skenario low pada angka 4,14%, moderate pada 5,65% dan 7,39%. Hal ini berdasarkan asumsi komponen pendapatan daerah dan investasi yang merupakan sektor penggerak yang memiliki multiplier effect pada pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo. Selain itu program Agro Maritim diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan perbaikan tata kelola dan manajemen keuangan sektor nelayan dan perikanan yang selama ini potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Perbaikan pada infrastruktur, akses dan amenities pariwisata diharapkan dapat memberikan tambahan *spending time* wisatawan yang ada di Lokasi prioritas wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga sektor riil di sekitar kawasan wisata akan lebih masif bergerak. Ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai sentra kawasan pengolahan tanaman pangan dan Perkebunan oleh Pemerintah pusat diharapkan dapat menghadirkan investasi baru yang mendukung hilirisasi sektor primer sehingga bisa memberikan *added value* pada komoditi strategis yang dihasilkan oleh daerah ini.

Dari sektor pertambangan, Proyek Emas Pani (*Pani Gold Project*) di Kabupaten Pohuwato ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2025 dan diproyeksikan akan menjadi tambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik, maka otomatis akan memberikan signifikansi pada share dan pertumbuhan komponen PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian yang pada Triwulan III tahun 2024 menempati peringkat kedua Lapangan Usaha (LU) dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,50% *YoY* setelah LU sektor Perdagangan.

Dengan memperhatikan berbagai hal di atas maka untuk proyeksi IKU 205 dan target 2026 dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel. 3.11
 Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2025-2026

Indikator	Capaian 2025	Target Induk 2026	Target Perubahan 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,71	5,65	5,74
Kemiskinan (%)	12,62	13,54	12,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,23	2,75	3,01-3,26

(%)			
Indeks Gini	0,382	0,417	0,378
Indeks Modal Manusia	0,50 (2024)	0,51	0,51
Inflasi (%)	2 – 3 %	2,4 – 2,8	2 - 3 %
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	57,8 (2024)	64,55	64,55

Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Selain itu Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2026 diprioritaskan untuk pemenuhan Prioritas Kebijakan Mandatori (Mandatory Spending) yang akan diakomodir dalam APBD 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya pada alokasi Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain PAD yang sah Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi pendapatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Realisasi Pendapatan 2021 s/d 2025

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	%	TAHUN 2023	%	TAHUN 2024	%	TAHUN 2025	%	RATA-RATA KENAIKAN (%)
	REALISASI	REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		
PENDAPATAN	1.968.370.374.668,08	1.848.593.656.987,83	(6,09)	1.872.487.105.528,68	1,29	1.930.340.898.696,23	3,09	1.807.751.974.849,61	(6,35)	(2,01)
PAD	509.512.324.459,08	510.337.164.773,83	0,16	511.931.921.680,68	0,31	538.193.943.200,23	5,13	507.033.757.368,61	(5,79)	(0,05)
Pajak Daerah	400.833.243.843,00	440.543.999.280,00	9,91	432.906.096.022,00	(1,73)	457.233.185.366,00	5,62	413.560.339.637,00	(9,55)	1,06
Retribusi Daerah	5.575.147.290,00	5.003.122.986,00	(10,26)	4.232.976.524,00	(15,39)	54.311.313.591,00	1.183,05	60.658.647.786,84	11,69	292,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.092.544.065,00	5.590.830.014,00	9,78	11.012.325.878,00	96,97	11.580.368.337,00	5,16	11.523.134.919,00	(0,49)	27,85
Lain-lain PAD yang Sah	98.011.389.261,08	59.199.212.493,83	(39,60)	63.780.523.256,68	7,74	15.069.075.906,23	(76,37)	21.291.635.025,77	41,29	(16,74)
Pendapatan Transfer	1.456.453.867.885,00	1.334.494.317.475,00	(8,37)	1.350.262.842.740,00	1,18	1.385.451.449.664,00	2,61	1.291.254.893.797,00	(6,80)	(2,85)
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	24.656.712.135,00	23.900.291.978,00	(3,07)	23.449.484.007,00	(1,89)	24.972.779.787,00	6,50	33.735.306.800,00	35,09	9,16
Dana Alokasi Umum (DAU)	940.639.321.000,00	940.903.029.000,00	0,03	979.869.891.000,00	4,14	1.022.379.872.000,00	4,34	1.024.029.702.271,00	0,16	2,17
Dana Alokasi Khusus (DAK)	451.415.054.750,00	299.040.640.497,00	(33,75)	316.498.122.733,00	5,84	330.415.915.877,00	4,40	226.786.854.726,00	(31,36)	(13,72)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID) / Insentif Fiskal	39.742.780.000,00	70.650.356.000,00	77,77	30.445.345.000,00	(56,91)	7.682.882.000,00	(74,77)	6.703.030.000,00	(12,75)	(16,66)
Lain-lain PAD yang Sah	2.404.182.324,00	3.762.174.739,00	56,48	10.292.341.108,00	173,57	6.695.505.832,00	(34,95)	9.463.323.684,00	41,34	59,11
Hibah	1.959.237.740,00	3.264.864.061,00	66,64	9.707.761.108,00	197,34	6.231.945.832,00	(35,80)	0,00	(100,00)	32,04
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	444.944.584,00	497.310.678,00	11,77	584.580.000,00	17,55	463.560.000,00	(20,70)	9.463.323.684,00	1.941,45	487,52

Pada tahun 2025 secara Pertumbuhan Realisasi Pendapatan turun sebesar 6,35% jika dibandingkan tahun 2024 dengan total Rp1.930.340.898.696,23. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 - 2025 jika dirata – rata adalah sebesar minus 0,05% dengan penurunan sebesar 31,1 Milyar pada tahun 2025 untuk kategori Pajak Daerah. Sedangkan pada komponen Retribusi Daerah yang naik sebesar 11,69% yang pada tahun 2024 sebesar 54,3 M, untuk tahun 2025 menjadi sebesar 60,6 M yang merupakan kontribusi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hasri Ainun Habibie.

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2026 diprediksi naik sebesar 2,27% dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah tahun berjalan 2026. Proyeksi perubahan pendapatan asli daerah tahun 2026 diprediksi naik sebesar 2,61% yaitu pada alokasi pajak daerah khususnya pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dana transfer pada perubahan RKPD tahun 2026 masih diproyeksikan sama dengan APBD tahun anggaran 2026. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan RKPD tahun 2026 diproyeksikan naik sebesar 750% yaitu pada alokasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang mengalami kenaikan sebesar 3 Milyar atas penghargaan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo berupa Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Kategori Terbaik 1 Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Provinsi Kluster Pulau Sulawesi sesuai KEPMENDAGRI Nomor 000.6.9.2-862 Tahun 2026.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah serta pembayaran angsuran pokok utang dan bunga Pinjaman PEN tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan belanja daerah tetap mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas yang terkandung didalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2026 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif serta memiliki daya ungkit dalam pencapaian tujuan ditengah keterbatasan fiskal saat ini. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan *money follow program* (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah.

Kebijakan belanja pada tahun berjalan 2026 dalam pemanfaatan SiLPA berfokus pada pemenuhan Kewajiban Jangka Pendek yang harus diselesaikan, antara lain angsuran pokok utang dan bunga Pinjaman PEN tahun 2021 serta penganggran kembali sisa dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sampai dengan tahun 2025.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan

untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025

Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dalam realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 150,51% dari Rp99,587 miliar pada tahun anggaran 2024 menjadi Rp249,47 miliar pada tahun anggaran 2025. Kondisi ini mengindikasikan perubahan dinamika fiskal yang perlu mendapat perhatian serius. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor kunci, antara lain realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari proyeksi, anggaran belanja tidak tersinkronisasi dengan tujuan pembangunan daerah dan atau adanya penundaan belanja karena adanya ketidaksesuaian akibat transisi regulasi dari pemerintah pusat ditengah tahun berjalan.

Berdasarkan analisis tersebut, Perubahan RKPD 2026 perlu memformulasikan beberapa langkah strategis. Prioritas utama adalah penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dengan memperluas basis pajak dan retribusi, serta peningkatan efektivitas pemungutan. Kedua, replikasi model keberhasilan BLUD RSUD ke unit layanan publik lainnya seperti pendidikan dan infrastruktur. Ketiga, percepatan dan efisiensi penyerapan DAK Fisik/Non-Fisik untuk memastikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penerapan perencanaan anggaran berbasis kinerja menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendukung program-program prioritas. Dengan pendekatan komprehensif ini, Provinsi Gorontalo dapat memitigasi risiko penurunan SiLPA sekaligus memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif serta peningkatan realisasi belanja yang sesuai dengan tujuan Pembangunan daerah dan bersesuaian dengan prioritas nasional.

Secara keseluruhan, ringkasan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 dapat dicermati pada tabel berikut:

Realisasi Tahun 2023-2025 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026

Kode	Uraian	Jumlah							
		Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2025	%	APBD 2026	Proyeksi Perubahan RKPD TA 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	511.931.921.680,68	101,37	538.193.288.200,23	104,19	507.033.757.368,61	122,92	440.637.144.272,00	450.637.144.272,00
4.1.01	Pajak Daerah	432.906.096.022,00	99,54	457.233.185.366,00	104,48	413.560.339.637,00	115,76	383.247.650.841,00	393.247.650.841,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.232.976.524,00	63,28	54.310.658.591,00	110,64	60.658.647.786,84	171,24	42.363.093.431,00	42.363.093.431,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.012.325.878,00	100,39	11.580.368.337,00	113,32	11.523.134.919,00	230,46	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.780.523.256,68	121,58	15.069.075.906,23	76,88	21.291.635.025,77	143,68	4.026.400.000,00	4.026.400.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.350.262.842.740,00	98,60	1.385.451.449.664,00	98,52	1.291.254.893.797,00	101,59	1.096.723.807.000,00	1.096.723.807.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.350.262.842.740,00	98,60	1.385.451.449.664,00	98,52	1.291.254.893.797,00	101,59	1.096.723.807.000,00	1.096.723.807.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.292.341.108,00	312,92	6.695.505.832,00	417,65	9.463.323.684,00	2.365,83	400.000.000,00	3.400.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.707.761.108,00	753,02	6.231.945.832,00	564,93	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	584.580.000,00	29,23	463.560.000,00	92,71	9.463.323.684,00	2.365,83	400.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.872.487.105.528,68	99,72	1.930.340.243.696,23	100,31	1.807.751.974.849,61	107,35	1.537.760.951.272,00	1.550.760.951.272,00

Realisasi Tahun 2023 - 2025 dan Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026

Kode	Jenis Belanja Daerah	Jumlah							
		Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2025	%	APBD TA. 2026	Proyeksi Perubahan RKPD TA 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1	BELANJA OPERASI	1.475.863.473.693,15	93,05	1.556.182.022.343,16	96,91	1.385.671.799.695,26	94,04	1.368.764.077.272,00	1.467.306.947.510,62
5.1.01	Belanja Pegawai	657.826.026.577,00	91,16	764.595.004.643,00	97,76	759.969.115.989,00	93,55	825.024.190.005,99	844.361.376.015,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.268.455.177,15	94,68	641.715.150.644,16	95,28	591.748.484.625,26	94,36	521.129.961.769,01	599.646.145.997,63
5.1.03	Belanja Bunga	7.093.341.745,00	98,67	6.439.282.345,00	101,42	5.352.880.214,00	91,43	4.204.849.829,00	4.204.849.829,00
5.1.05	Belanja Hibah	85.797.138.870,00	98,10	132.240.736.851,00	99,82	22.020.270.867,00	102,74	15.839.075.668,00	16.258.575.668,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.878.511.324,00	82,03	11.191.847.860,00	99,19	6.581.048.000,00	97,82	2.566.000.000,00	2.836.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	230.302.490.856,51	87,15	220.354.238.401,45	85,58	98.779.674.718,24	84,21	92.446.948.425,00	109.512.502.380,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000.000,00	10.350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.681.672.265,00	97,58	73.194.098.495,00	96,99	33.913.609.930,03	91,06	13.128.681.985,00	16.229.818.203,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.838.898.903,91	82,52	68.302.416.338,45	71,53	39.400.541.873,21	75,78	61.533.791.434,00	67.853.496.570,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.110.943.553,60	82,91	70.394.263.930,00	89,51	25.327.722.915,00	97,70	9.350.475.006,00	14.995.187.607,74
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.670.976.134,00	121,69	8.463.459.638,00	107,19	137.800.000,00	100,00	84.000.000,00	84.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	991.984.875,00	9,00	4.701.497.713,00	85,53	835.567.806,00	11,76	6.774.907.615,00	6.302.201.397,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	991.984.875,00	9,00	4.701.497.713,00	85,53	835.567.806,00	11,76	6.774.907.615,00	6.302.201.397,00
5.4	BELANJA TRANSFER	193.438.038.459,00	92,60	202.203.513.267,00	96,47	155.258.370.306,00	93,21	153.320.730.869,00	200.175.402.191,40
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	191.718.038.459,00	92,64	199.603.513.267,00	96,60	151.058.370.306,00	94,52	152.694.730.869,00	199.549.402.191,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.720.000.000,00	88,43	2.600.000.000,00	87,39	4.200.000.000,00	62,30	626.000.000,00	626.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.900.595.987.883,66	91,80	1.983.441.271.724,61	95,43	1.640.545.412.525,50	92,98	1.621.306.664.181,00	1.783.297.053.479,82

Realisasi Tahun 2023 - 2025 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026

Kode	Uraian	Jumlah							
		Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2025		APBD TA. 2026	Proyeksi Perubahan RKPD TA 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	199.014.777.167,67	103,33	152.688.158.901,00	99,17	82.543.396.061,31	102,47	83.545.712.909,00	232.536.102.207,82
6.1	Penerimaan Pembiayaan	228.765.815.327,67	100,00	170.905.894.813,00	100,00	99.478.779.305,31	99,89	100.481.096.153,00	249.471.485.451,82
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	228.765.815.327,67	100,00	170.905.894.813,00	100,00	99.478.779.305,31	99,89	100.481.096.153,00	249.471.485.451,82
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	29.751.038.160,00	82,28	18.217.735.912,00	107,57	16.935.383.244,00	88,97	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.751.038.160,00	78,42	18.217.735.912,00	107,57	16.935.383.244,00	100,00	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYEKSI POSTUR PERUBAHAN APBD TA 2026 TAHAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Kode	Uraian	APBD 2026	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	440.637.144.272,00	450.637.144.272,00	10.000.000.000,00	2,27
4.1.01	Pajak Daerah	383.247.650.841,00	393.247.650.841,00	10.000.000.000,00	2,61
4.1.02	Retribusi Daerah	42.363.093.431,00	42.363.093.431,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.026.400.000,00	4.026.400.000,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.723.807.000,00	1.096.723.807.000,00	0,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.096.723.807.000,00	1.096.723.807.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.000.000.000,00	750,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.537.760.951.272,00	1.550.760.951.272,00	13.000.000.000,00	0,85
5.1	BELANJA OPERASI	1.368.764.077.272,00	1.467.306.947.510,62	98.542.870.238,62	7,20
5.1.01	Belanja Pegawai	825.024.190.005,99	844.361.376.015,99	19.337.186.010,00	2,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.129.961.769,01	599.646.145.997,63	78.516.184.228,62	15,07
5.1.03	Belanja Bunga	4.204.849.829,00	4.204.849.829,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.839.075.668,00	16.258.575.668,00	419.500.000,00	2,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.566.000.000,00	2.836.000.000,00	270.000.000,00	10,52
5.2	BELANJA MODAL	92.446.948.425,00	109.512.502.380,80	17.065.553.955,80	18,46
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.350.000.000,00	10.350.000.000,00	2.000.000.000,00	23,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.128.681.985,00	16.229.818.203,00	3.101.136.218,00	23,62
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.533.791.434,00	67.853.496.570,06	6.319.705.136,06	10,27
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.350.475.006,00	14.995.187.607,74	5.644.712.601,74	60,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.774.907.615,00	6.302.201.397,00	-472.706.218,00	-6,98
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.774.907.615,00	6.302.201.397,00	-472.706.218,00	-6,98
5.4	BELANJA TRANSFER	153.320.730.869,00	200.175.402.191,40	46.854.671.322,40	30,56
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	152.694.730.869,00	199.549.402.191,40	46.854.671.322,40	30,69
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	626.000.000,00	626.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.621.306.664.181,00	1.783.297.053.479,82	161.990.389.298,82	9,99
	Surplus/Defisit	-83.545.712.909,00	-232.536.102.207,82	-148.990.389.298,82	178,33
6	PEMBIAYAAN DAERAH	83.545.712.909,00	232.536.102.207,82	148.990.389.298,82	178,33
6.1	Penerimaan Pembiayaan	100.481.096.153,00	249.471.485.451,82	148.990.389.298,82	148,28
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.481.096.153,00	249.471.485.451,82	148.990.389.298,82	148,28
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	0,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	0,00	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	83.545.712.909,00	232.536.102.207,82	148.990.389.298,82	178,33
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2045 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025 - 2029. Dokumen ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Gusnar Ismail dan Idah Syahidah yang mengusung Gorontalo Maju dan Sejahtera yang mengacu pada RPJPD 2025 -2045 dengan visi Gorontalo Provinsi Madani Yang Maju dan Berkelanjutan.

4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1.

Tujuan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan serta isu dan tantangan pembangunan, Gubernur Gorontalo telah menetapkan Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah:

Visi :

"Gorontalo Maju dan Sejahtera"

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : Gorontalo Maju, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi "Gorontalo Maju dan Sejahtera" maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan
2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia

3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 difokuskan pada *Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.*

Tujuan pertama yakni Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan akan dicapai melalui 2 strategi yakni menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (supply side) yang merata dan meningkatkan sisi permintaan (demand side) didukung oleh sektor riil, eksternal, fiskal, dan keuangan. Untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (supply side) yang merata akan didorong melalui : peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, mendorong pembangunan industri pengolahan untuk mendukung hilirisasi, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aktivitas wisatawan bernilai tambah tinggi dan pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya untuk meningkatkan sisi permintaan (demand side) didukung oleh sektor riil, eksternal, fiskal, dan keuangan akan didorong melalui upaya : menjaga konsumsi masyarakat melalui peningkatan peran kelas menengah dan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi berkualitas berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan ekspor dan perdagangan antar pulau serta mendorong partisipasi swasta.

Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, dan Indeks Daya Saing Daerah.

Tujuan kedua yaitu penurunan kemiskinan dan kesenjangan akan dilakukan melalui strategi utama yakni pemberdayaan ekonomi berkelanjutan & Inovatif, perlindungan sosial yang Integratif, adaptif dan inklusif, peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin) serta program kewilayahan, konektivitas, pasar kerja, dan lainnya. Tujuan ini diukur dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini.

Tujuan pembangunan ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilaksanakan melalui strategi utama yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan modal manusia, peningkatan modal sosial budaya. Untuk peningkatan layanan dasar difokuskan pada : percepatan wajib belajar 13 tahun, penuntasan stunting dan tuberculosis, pengembangan RS provinsi dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk peningkatan modal manusia difokuskan pada : peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics* (STEAM) berkualitas, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta dukungan terhadap

penyelenggaraan makan bergizi gratis untuk siswa dan ibu hamil. Untuk peningkatan modal sosial budaya difokuskan pada pendidikan karakter, agama dan budaya, serta pendidikan keluarga. Tujuan ini diukur dengan Indeks Modal Manusia.

Tujuan pembangunan keempat yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

merupakan salah satu tujuan pembangunan yang berfokus pada upaya memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan ini dicapai dengan melakukan berbagai upaya seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah yang efektif, serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dan air minum layak. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kunci, antara lain Indeks Risiko Bencana yang mencerminkan tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah terhadap bencana, Persentase Penurunan Emisi GRK sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, serta efektivitas Pengelolaan Sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi GRK.

Tujuan pembangunan kelima adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

yang berfokus untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sasaran utamanya adalah terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, serta hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya seperti reformasi hukum, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Reformasi Hukum yang menilai kemajuan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengukur pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan transparansi, Indeks Pelayanan Publik yang menilai kualitas layanan kepada masyarakat, dan Indeks Integritas Nasional yang mengukur tingkat integritas dan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 4.1
Indikator dan Target Tujuan Pembangunan Provinsi Gorontalo

TUJUAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2025	TARGET 2026
Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,71	5,74
	PDRB Per Kapita	47,48	49
	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,68
Penurunan kemiskinan dan kesenjangan	Tingkat Kemiskinan	12,62	12,46
	Rasio Gini	0,382	0,378
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,50 (2024)	0,51
	Indeks Pembangunan Manusia	72,62	73,31
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	57,28 (2024)	64,55
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	84,08	84,98

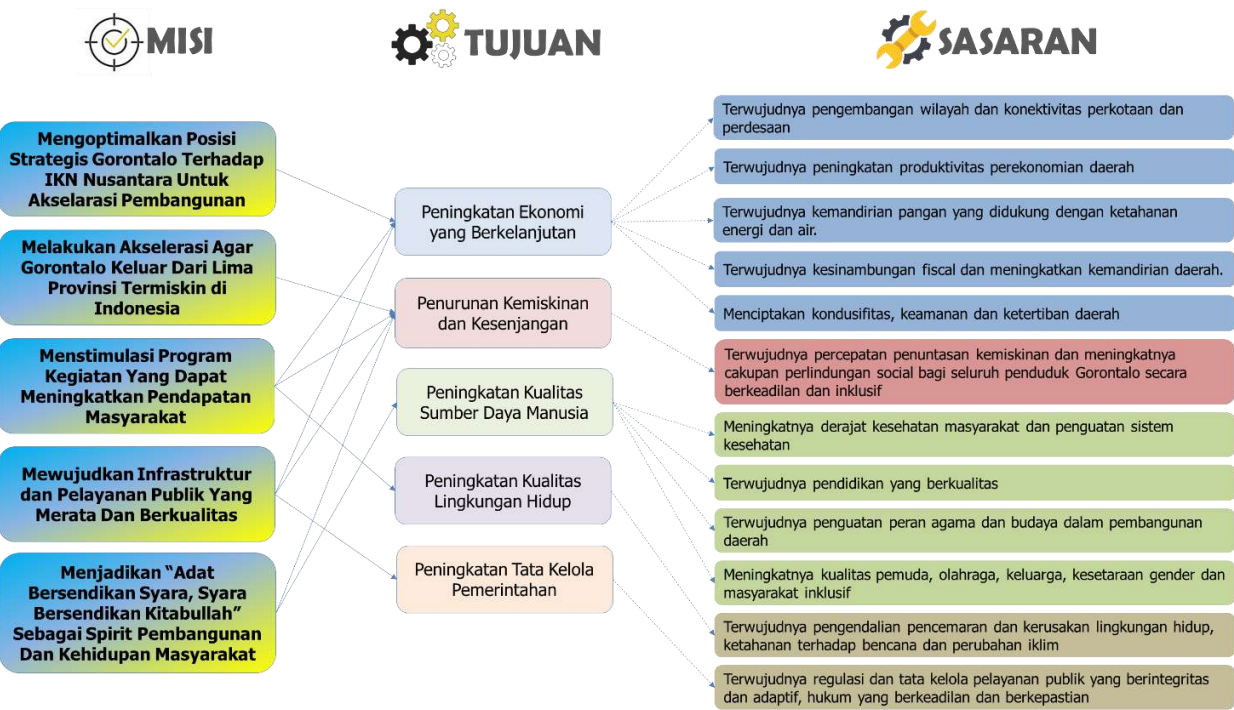
4.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Dalam perumusannya, berdasarkan penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, ditetapkan 12 sasaran dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan
2. Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah
3. Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air
4. Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.
5. Menciptakan kondusifitas, stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
6. Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
8. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
9. Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah

- 10.Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.
- 11. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
- 12.Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dapat dicermati pada bagan berikut:



4.1.3. Program Unggulan Pembangunan 2025-2029

Prioritas utama pembangunan adalah arahan fokus utama dalam pembangunan daerah tahun RPJMD 2025-2029. Berdasarkan Visi dan Misi dan tujuan sasaran Pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, maka program unggulan pembangunan dititikberatkan pada :

- 1) **Peningkatan Sumber Daya Manusia** yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas layanan dan prasarana kesehatan yang inklusif, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penuntasan stunting, pembangunan keluarga, peningkatan peran pemuda, prestasi olahraga serta pemajuan adat dan budaya Gorontalo dengan prinsip falsafah "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah".
- 2) **Usaha Mikro Kecil Menengah**, yakni penguatan peran UMKM dalam memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.
- 3) **Agro Maritim**, focus pada pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penguatan hilirisasi. Pertanian akan dititikberatkan pada pengamanan ketahanan pangan secara nasional dengan potensi pertanian dan peternakan di provinsi Gorontalo. Sektor perikanan fokus pada peningkatan pendapatan nelayan khususnya pada perikanan tangkap dengan skema taksi nelayan.
- 4) **Pariwisata**, menopang ekonomi daerah melalui revitalisasi dan pengembangan objek wisata potensial berstandar nasional dan internasional termasuk potensi Geopark Gorontalo.
- 5) **Infrastruktur**, pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan konektivitas transportasi, penyediaan energi, air bersih, layanan teknologi informasi termasuk sarana prasarana di pedesaan dan kota dalam mendukung pengembangan wilayah secara adil, merata, serta berkelanjutan.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

4.2.1 Isu Strategis Daerah

Pembangunan di Provinsi Gorontalo terus berkembang dan mengalami kemajuan namun disisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang berdampak signifikan sehingga harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan kebijakan dan program strategis yang terencana, sinergis dan berkelanjutan. Identifikasi isu strategis berdasarkan pada permasalahan dan dinamika yang terjadi di lingkungan lokal, regional, nasional dan global serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkedilan.

Permasalahan dan isu strategis daerah adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Aspek Ekonomi

a. Daya saing dan produktifitas ekonomi daerah rendah

- Produktifitas ekonomi relatif rendah, kontribusi PDRB tahun 2024 di Sulawesi 2,25% atau terendah dan kontribusi terhadap PDB hanya 0,2 persen.
- Kurangnya diversifikasi ekonomi, struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap struktur PDRB;
- Proses produksi bersifat parsial, upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian terkendala akses teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam hal pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk;
- Kapasitas dan kualitas SDM terbatas, penguasaan iptek, inovasi dan adaptasi teknologi belum memadai sehingga produk/ jasa yang dihasilkan belum memiliki nilai tambah dan berdaya saing;
- Manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih belum optimal.
- Belum optimalnya industri pengolahan dan pertambangan

b. Koperasi dan UMKM belum memberikan Kontribusi Signifikan bagi penciptaan nilai tambah

- Pelaku usaha sebagian besar masih berskala mikro (94,5%)
- Rendahnya kontribusi koperasi sector produksi
 - Kurangnya penerapan standar sertifikat teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha dan UMKM
 - Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri

- Belum optimalnya ekosistem usaha, kualitas sdm terhadap diversifikasi produk melalui adaptasi teknologi dan inovasi masih terbatas, manajemen koperasi, pemasaran dan perluasan bidang usaha koperasi serta belum masifnya penerapan koperasi berbasis syariah.

c. **Produktifitas dan Daya Saing tenaga kerja rendah.**

- Sebagian pekerja yang baru memasuki pasar kerja berada di sektor yang memiliki kontribusi rendah terhadap PDRB, dengan upah rendah dan sedikit kesempatan untuk mengembangkan karir, sehingga kurang motivasi untuk meningkatkan produktivitas.
- Kesempatan kerja terbatas, serapan tenaga kerja terbesar disumbang oleh kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD sebesar 47,67 persen.
- Tenaga kerja masih didominasi pada sektor informal 61,45 persen dan serapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian 30,18 persen (tahun 2024), dengan tingkat upah yang relatif kecil..
- Usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (*Not Employment, Education and Training*) masih cukup tinggi tahun 2024 sebesar 21,89 persen.
- Adanya kecenderungan ketidaksesuaian antara keterampilan kerja yang dimiliki dengan kebutuhan pasar.
- Kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi.

d. **Tingkat produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan belum optimal.**

- Produktivitas komoditi di sektor pertanian belum optimal. Dari sisi kualitas dan harga produk pertanian disebabkan oleh berkurangnya kemampuan/ kualitas lahan dan minimnya sarana dan prasarana produksi yang berbasis teknologi tepat guna.
- Kapasitas SDM petani dan penyuluh belum optimal dalam perkembangan inovasi dan adaptasi teknologi pertanian
- Belum maksimalnya infrastruktur jaringan irigasi dan kualitas air untuk pengairan akibat cemaran limbah pertambangan di hulu dan sedimentasi karena bencana banjir.
- Dampak perubahan iklim dan sistem pengendalian hama yang belum optimal mempengaruhi mutu produk pertanian dan menjadi penyebab terjadinya gagal panen. Diversifikasi komoditi belum dikembangkan dengan maksimal khususnya komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati oleh pasar internasional.

- Capaian Nilai Tukar Petani belum optimal Akses terhadap teknologi, permodalan serta kelembagaan yang mendukung usaha petani belum optimal

e. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat

- Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato, sedangkan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo, dan kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294,134,501,750 Kkal. Beberapa wilayah memiliki kebutuhan pangan terbesar, namun ketersediaan pangan yang cukup rendah.
- Pola distribusi pangan rendah sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan sulit mengakses pangan.

f. Kontribusi pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian daerah

- Pengelolaan kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo belum optimal, minimnya ketersediaan infrastruktur sarana prasarana di lokasi destinasi, amenitas yang terbatas dan belum sesuai dengan standard tujuan wisata mancanegara. Belum adanya paket wisata dengan atraksi menarik dan mempengaruhi lama tinggal wisatawan, aksesibilitas ke lokasi destinasi yang belum optimal, SDM pariwisata masih belum memadai.
- Pengelolaan Produk wisata belum dikembangkan sesuai dengan karakteristik potensi daerah serta promosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial.
- Ekonomi Kreatif belum optimal

g. Kondisi infrastruktur dan konektivitas masih belum optimal

- Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal, kondisi mantap jalan provinsi tahun 2024 masih di angka 66,1 persen. Panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 137,31 Km, dan rusak ringan sebesar 12,09 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,12 persen.
- Kondisi Daerah Irigasi/DI kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58 M dalam kondisi Baik (B) 30,19 %, Rusak Sedang (RS) 35,09 sementara Rusak Berat (RB) 34,72 %
- Konektivitas antar wilayah masih rendah, belum terbukanya beberapa ruas jalan di antaranya Marisa – Tolinggula, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi.

h. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.

Implementasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum adanya observasi dalam pengelolaan tentang potensi *blue carbon* dipesisir. Tantangan lainnya masih belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan masih belum memadai dan belum dikelola dengan baik. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di perairan Gorontalo. *Illegal* dan *over fishing* masih tinggi sebab rendahnya sistem pengawasan kelautan. Tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan masih rendah.

i. **Energi terbarukan dan efisiensi energi belum optimal**

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2023 di angka 12,35 persen berada sedikit diatas target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), tahun 2023 yaitu 11,76%.

j. **Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.**

Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah. Selain itu kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK berupa jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan TIK juga diperhadapkan pada tantangan dalam mengadopsi teknologi, serta penerapan teknologi berbasis *Artificial Intellegence*. Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi serta keamanan siber belum memadai.

k. **Penataan perkotaan, penanganan kawasan perumahan dan permukiman masih belum optimal.**

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hunian, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta peran serta masyarakat untuk penanganan kawasan kumuh dan kondisi permukiman belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh semakin meningkat. Layanan SPM bidang Perumahan yg menjadi kewajiban pemerintah daerah yakni pembangunan rumah bantuan bagi korban bencana dan fasilitasi bantuan rumah bagi warga yang rumahnya harus direlokasi akibat program Pemerintah belum mencapai level yg diharapkan.

4.2.1.2 Aspek Sosial

a. Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum merata

- Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 15 tahun ke atas rendah (tahun 2024: 8,29)
- Angka Putus Sekolah masih tinggi
- Layanan pendidikan belum merata, Kualitas Pendidikan masih rendah belum capai mencapai standar kompetensi minimum pada asesment tingkat nasional
- Kualitas, kuantitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan masih terbatas
- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum optimal;
- Kesadaran masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah masih rendah;
- Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi masih belum optimal, terutama pada jenjang pendidikan khusus dan SMK;
- Pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal

b. Pelayanan kesehatan belum optimal

- Sarana dan Prasarana layanan kesehatan belum optimal, Rumah Sakit Ainun masih bersatatus Tipe C;
- Umur Harapan Hidup Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 70,73 lebih rendah dari capaian nasional yaitu 74,15;
- Tingginya angka penyakit menular dan tidak menular seperti Tuberkulosis, HIV Aids, Demam Berdarah;
- Tingginya Angka keluhan penyakit di angka 35,35 pada tahun 2023. keluhan penyakit lebih tinggi dialami oleh Perempuan sebesar 37,27% sedangkan laki-laki sebesar 33,45%.
- Angka Kematian Ibu dan bayi masih tinggi dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
- Prevalensi stunting masih tinggi berada di atas rata-rata nasional (26,9%, 2023) urutan 12 secara nasional.
- Belum optimalnya sistem layanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
- Belum optimalnya sistem ketahanan Kesehatan dari sisi Ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan;
- Ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada fasilitas layanan kesehatan dan menjangkau seluruh wilayah khususnya daerah terpencil.

- Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan seimbang
- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat masih rendah
- Akses terhadap sanitasi aman dan air bersih masih rendah

c. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan

- Provinsi Gorontalo berada di urutan ke-5 sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diangka 15,15 persen, di tahun 2024 mengalami penurunan 0,58% dan berada diangka 13,87%;
- Karakteristik penduduk miskin Provinsi Gorontalo memiliki tingkat partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah cenderung rendah. Mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata kepala keluarga penduduk miskin berada pada usia produktif;
- Pengelolaan data sosial ekonomi yang terintegrasi untuk penetapan sasaran penerima program belum optimal;
- Tahun 2023 Gini Ratio masih berada diangka 0,417, diatas rata-rata nasional dan tertinggi diwilayah Sulawesi. Kondisi ketimpangan terbesar berada di daerah perkotaan. Rata-rata peningkatan pengeluaran perkapita perbulan wilayah perkotaan sebesar 11,63 persen, sementara peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diwilayah pedesaan tidak sebesar wilayah perkotaan yaitu hanya sebesar 4,40 persen. Kesenjangan pendapatan ini disebabkan antara lain ketidakmerataan pembangunan, aktivitas ekonomi, aksesibilitas, kualitas SDM.

d. Kesetaraan Gender belum optimal

Indeks Ketimpangan gender tahun 2023 diangka 0,391 berada dibawah IKP nasional yang artinya lebih kecil ketimpangannya namun beberapa dimensi dalam IKG masih rendah yaitu pada dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan yaitu partisipasi perempuan di politik dan pengambilan keputusan serta dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan rendah, kontribusi perempuan terhadap pendapatan rendah. Penyebabnya antara lain keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan, beban ganda yang menyebabkan perempuan terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan mengurangi kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi.

e. Kualitas keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan hak kepada Perempuan, anak dan pemuda serta kelompok rentan belum optimal.

- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, yang didominasi oleh KDRT dan kekerasan seksual.

- Perkawinan Anak tinggi dan tingginya angka perceraian
- Indeks Perlindungan Anak masih rendah (tahun 2023: 63,22)
- Indeks Pembangunan Pemuda (2023:53,83), presentase NEET (2024: 21,89)
- Belum optimalnya layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas dan Lansia yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Provinsi, serta cakupan layanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masih rendah.

f. Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal

Pengaruh budaya global, akses teknologi dan informasi, perilaku masyarakat yang semakin individualis, pergeseran karakter, pola pikir, moral yang pranatanya mempengaruhi nilai agama dan budaya dalam masyarakat.

4.2.1.3 Aspek Lingkungan Hidup

a. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lahan menurun seiring dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi, aktifitas pertambangan dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat keanekaragaman hayati. Hasil analisis perkembangan antar waktu Peta jasa ekosistem penyediaan air Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan kinerja jasa ekosistem penyedia air sebesar 20% dari total luas Provinsi Gorontalo sementara wilayah yang jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori sedang dan rendah terjadi peningkatan di semua wilayah kabupaten/kota.

b. Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup /IKLH Provinsi Gorontalo tahun 2024 diangka 78,5 menurun dibandingkan tahun 2023 diangka 79,52 masih termasuk pada kategori BAIK. Kualitas air di Provinsi Gorontalo berada pada kondisi cemar ringan dan cemar sedang. Penurunan kualitas air disebabkan oleh limbah yang mengalir ke badan sungai yang berasal dari aktifitas pertambangan, industri, pertanian, perkebunan dan limbah domestik rumah tangga. Selain itu kualitas udara mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan kendaraan.
- Kerentanan daya dukung ekosistem laut akibat meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Pengelolaan pesisir dan laut yang tidak berkelanjutan menyebabkan berkurangnya ekosistem terumbu karang dan berkurangnya luasan kawasan mangrove.
- Emisi GRK di Gorontalo cenderung mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu enam tahun, kenaikan emisi GRK di Gorontalo mencapai 1.019,75 Gg CO₂e. Urutan sektor penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah.

c. Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto

Danau Limboto telah ditetapkan menjadi salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Berdasarkan data selang Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha atau dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air di Danau Limboto yang disebabkan pada tingginya sedimentasi dan proses eutrofikasi yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogren dan fospor didalam perairan. Hal lainnya Pertumbuhan enceng gondok yang semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau. Aktifitas masyarakat di hulu sungai dan wilayah sekitar yang memanfaatkan danau sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan kondisi danau terus mengalami penurunan.

d. Terdapat hutan dan lahan kritis

Luas lahan kritis yang tersebar di dalam kawasan sebesar 90.580,07 Ha sementara di luar kawasan sebesar 134.857,93 Ha. Total lahan kritis tahun 2022 sebesar 225.438 Ha. Luasan lahan kritis lebih besar berada pada wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Aktifitas pemanfaatan lahan pertanian yang tidak cerdas iklim juga berada dilahan miring yang semakin tidak terkendali, berdampak pada kondisi dan struktur lahan yang jika tidak diantisipasi menyebabkan kerusakan lahan, erosi dan sedimentasi yang semakin meningkat.

e. Cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman masih rendah

- Presentasi Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi diangka 81,72 persen masih terdapat 19,28 persen masyarakat belum memiliki sarana sanitasi layak. Sedangkan cakupan akses sanitasi aman hanya 4,14 persen jauh dibawah target nasional 15 persen tahun 2024.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap akses air minum layak selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan di tahun 2022 diangka 94, 19 meningkat menjadi 96.00 persen pada tahun 2023, namun masih berada dibawah target nasional akses air minum layak 100 persen ditahun 2024. Cakupan akses air minum aman masih rendah, tahun 2023 hanya mencapai 8,3 persen dibawah target nasional 15 persen tahun 2024.

f. Pengelolaan Sampah dan limbah belum optimal.

Optimalisasi TPA Talumelito masih rendah, TPST belum beroperasi maksimal, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memilah sampah, kelembagaan pengelolaan sampah dan sarana prasarana yang belum memadai. Pengelolaan limbah B3 di Provinsi Gorontalo juga belum dikelola secara mandiri.

g. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi.

- Indeks Resiko Bencana diangka 116,71 (Irbi, 2023) atau kategori Sedang
- Prioritas Penanganan Resiko Bencana dari tingkat kerentanan berdasarkan kelas resiko adalah bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, gempa bumi dan kekeringan.
- Tata kelola kebencanaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, belum optimal
- Sarana prasarana mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini bencana dan infrastruktur resiliens terhadap bencana masih rendah dan masih kurangnya literasi masyarakat yang inklusif terkait kesiapsiagaan bencana.

4.2.1.4 Tata Kelola Pemerintahan

a. Kapasitas Fiskal Rendah

Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2024 beradada di kategori rendah dengan angka 1,279 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 diangka 1,421. Sejak tahun 2021 pendapatan transfer cenderung menurun, adanya perubahan kebijakan Dana Transfer Daerah untuk *specific grant* dan *block grant*. Belanja pegawai lima tahun terakhir rata-rata meningkat di tahun 2023 mencapai 684.344.820.456. Perlu kebijakan untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal

- Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan Predikat BB. Namun capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B.
- Akses pelayanan public belum optimal
- Penerapan sistem merit belum optimal, khususnya standar kompetensi jabatan
- Indeks Profesionalitas ASN juga masih berada pada kategori Sedang.
- Pembangunan zona integritas yang belum maksimal, ditandai dengan belum adanya OPD yang mendapat predikat WBK/WBBM.
- Indeks Inovasi Daerah kategori di tahun 2024 masuk dalam kategori "kurang inovatif" kurang inovatif di angka 34,68 belum berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

c. Kapasitas Lembaga Demokrasi yang belum optimal

Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, Nilai aspek kebebasan dan kesetaraan IDI di Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori tinggi masing-masing sebesar 81,68 dan 83,32. Namun, pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, capaian Provinsi Gorontalo masih berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 73,43.

4.2.2 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) merupakan komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi segenap masyarakat dengan prinsip tidak ada satupun yang tertinggal. Panduan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk terlibat dalam upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan serta Rencana Aksi Daerah SDGs/TPB Provinsi Gorontalo

Terdapat 17 Tujuan dan 259 indikator pada metadata 2 (dua) yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menemukan bahwa 50 indikator diantaranya telah tercapai. Kemajuan yang cukup baik terdapat pada pilar hukum dan tata kelola, 29,41 persen indikator yang telah tercapai. Sementara itu, masih terdapat 37 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan perlu percepatan agar kembali *on track*.

Pilar sosial yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah indikator kemiskinan. Meski menurun, namun menunjukkan tren perlambatan. Indikator lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan juga prevalensi stunting. Adapun pada pilar ekonomi, isu yang menjadi tantangan antara lain adalah persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET), di Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan. Kondisi kemandirian fiskal juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pencapaian target pada pilar lingkungan hidup mengalami permasalahan diantaranya pada pemenuhan layanan dasar air minum. Degradasi lahan juga menjadi persoalan yang perlu untuk diberikan perhatian karena menyebabkan bencana. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya intensitas kejadian bencana di Provinsi Gorontalo seiring dengan meningkatnya luasan lahan kritis.

Dari hasil identifikasi tersebut, terdapat 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas yang perlu menjadi fokus yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	
TPB 1	Tanpa Kemiskinan
TPB 2	Tanpa Kelaparan
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak
TPB 8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi
TPB 10	Berkurangnya kesenjangan
TPB 11	Kota dan Permukiman berkelanjutan
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim
TPB 14	Ekosistem Laut
TPB 15	Ekosistem Darat
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

Selain isu dari analisis ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat juga isu lingkungan yang didasari 6 muatan KLHS yang terdiri atas kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Berdasarkan 6 muatan KLHS tersebut diperoleh isu anatara lain :

1. Kerusakan kawasan danau Limboto
2. Kerusakan ekosistem pesisir
3. Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan
4. Bencana Alam
5. Penurunan kualitas dan kuantitas air
6. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

4.2.3 Penelaahan Terhadap Isu Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

1. Tingkat produktivitas rendah di tengah persaingan global
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
5. Krisis lingkungan
6. Geopolitik dan geoekonomi
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

4.2.4 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo, beberapa isu penataan ruang yaitu berupa :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Degradasi Lahan
3. Illegal Logging
4. Pencemaran Lingkungan
5. Banjir
6. Kerusakan sumber daya laut dan pesisir
7. Pendangkalan Danau Limboto
8. Pertambangan Tanpa Izin
9. Kemiskinan

4.2.5 Penelaahan terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045

Pelaksanaan Periode I RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan penguatan pondasi transformasi pembangunan, pada tahap ini target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,7 persen per tahun. Tahapan awal ini diwujudkan melalui; Transformasi social focus pada pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social. Transformasi Ekonomi Fokus Pada Penguatan proses hilirisasi berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Transformasi tata Kelola focus pada kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada memperkuat supremasi hukum dan stabilitas daerah. Ketahanan social Budaya dan Ekologi Fokus pada penguatan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan

4.2.6 Penelaahan terhadap RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen jangka menengah tahap pertama untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Povinsi Gorontalo Tahun 2025-2045. Sampai dengan penetapan RKPD Tahun 2026, dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo telah masuk dalam tahap perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati dan kepada Inspektorat untuk direviu dan pada tahap akhir sebelum penetapan akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Secara substansi, RKPD Tahun 2026 sudah mengakomodir Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator dan target kinerja serta pendanaan. Diharapkan melalui RKPD tahun 2026, seluruh upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.3.1. Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2026

Berdasarkan RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun berjalan dan isu strategis pembangunan daerah, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2026 adalah:

“Peningkatan Ekonomi yang Inklusif melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Layanan Dasar yang didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas”

Adapun unsur tema RKPD tahun 2026 adalah, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2026

Peningkatan Ekonomi Inklusif yang	<div><div>1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan</div><div>2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian</div></div>
Optimalisasi Sumber Daya Alam	<div><div>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</div><div>2. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim</div></div>
Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar	<div><div>1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar</div></div>
Sumber Manusia berkualitas Daya yang	<div><div>1. Meningkatnya derajat kesehatan</div><div>2. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan</div><div>3. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama</div><div>4. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat</div><div>5. Meningkatnya budaya literasi Masyarakat</div><div>6. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa</div><div>7. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah</div><div>8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</div></div>

4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana tema yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 maka sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2026

No	Tema	Unsur Tema	Sasaran
	Peningkatan Ekonomi yang Inklusif melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Layanan Dasar yang didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas	Peningkatan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
			Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
		Optimalisasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
		Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar
		Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan
			Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan
			Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama
			Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat
			Meningkatnya budaya literasi Masyarakat
			Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
			Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

4.4.1. Sasaran Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi : Peningkatan konektivitas daerah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dand mendorong peningkatan investasi.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan yang mendukung ekonomi kerakyatan, penguatan kearifan lokal serta membuka potensi dan kantong-kantong produksi.
2. Peningkatan kawasan permukiman, penyediaan akses perumahan permukiman layak, terjangkau bagi masyarakat yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sistematis dan terintegrasi dalam kerangka pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.
3. Pengembangan ruas jalan untuk meningkatkan konektivitas darat dari sentra produksi ke sentra distribusi, dari sentra pertumbuhan ke sentra pendukung yang ditunjang oleh fasilitas penunjang dan pendukung keselamatan lalu lintas dan jalan raya.
4. Mendorong pertumbuhan serta pengembangan pelabuhan, bandara, sebagai pintu masuk-keluar dan jalur distribusi barang & jasa.
5. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis potensi wilayah di antaranya: Kawasan strategis industri terpadu, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis pertanian dan kawasan strategis terintegrasi lainnya secara berkelanjutan. Kawasan prioritas provinsi terintegrasi berupa kawasan religi perkantoran - sport centre dan Kawasan prioritas pedesaan, perluasan administratif kota.
6. Mendorong peningkatan kemandirian desa dan kelurahan.
7. Peningkatan investasi melalui roadmap dan pemetaan potensi wilayah setiap kabupaten/kota, perbaikan tata kelola perizinan, promosi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
8. Mendorong percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khususnya untuk kawasan-kawasan prioritas dalam rangka efektivitas, transparansi dan komitmen dalam pemanfaatan ruang yang terkendali dari aspek daya dukung dan daya tampung kelestarian lingkungan hidup
9. Peningkatan jejaring kelembagaan, penguatan kerjasama antar daerah dan antar negara melalui pemanfaatan teknologi, mendorong masuknya investasi hilirisasi, penguatan ekspor komoditas unggulan serta membuka aksesibilitas sebagai pintu masuk Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia

Fasilitasi Peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis digital dalam rangka mendukung pengembangan wilayah.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator dan Target Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25%	0,25	0,252
2	Persentase Desa Mandiri (%)	%	28,16%	40,79	42,31
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	28,88	30,88	31,88

4	Indeks Transformasi Digital	%	41,23	54,95	55,85
---	-----------------------------	---	-------	-------	-------

4.4.2. Sasaran Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini dibagi atas 4 strategi yaitu :

- 1) Strategi pertama adalah Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja, yang akan dilakukan melalui kebijakan :
1. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi digital, dan kemitraan usaha.

2. Peningkatan kapasitas UMKM melalui pemetaan dan implementasi penanganan UMKM secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kebutuhan pengembangannya sehingga dapat dilakukan intervensi yang efektif dan efisien tepat sasaran.

3. Intervensi dini UMKM dan tenaga kerja melalui pengembangan sekolah vokasi baik ditingkatan sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan keunggulan lokal wilayah.

4. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

5. Pengembangan Koperasi berbasis produksi dan kewirausahaan di tingkatan masyarakat baik kelompok rentan dan kelompok potensial tertentu.

6. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.

7. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

8. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan melalui perizinan, penyediaan SDM, regulasi dan fasilitas pendukung lainnya.
- 2) Strategi kedua yaitu Peningkatan Produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan :
1. Penyediaan dan pengelolaan terpadu sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan yang modern dan berkelanjutan

2. Peningkatan produksi dan populasi ternak seperti sapi, kambing, unggas

3. Peningkatan luasan lahan pertanian (cetak sawah baru) di kawasan potensial

4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian

5. Penguatan dan perlindungan sosial di bidang pertanian khususnya untuk pengendalian ijon serta kelembagaan petani dan nelayan

6. Optimalisasi program intervensi manajemen dan pengawasan yang lebih konsisten baik terkait dengan stabilitasi harga, penggunaan peralatan ukur dan pengendalian sarana prasarana pertanian
 7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 8. Peningkatan Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang laut dan kawasan konservasi
 9. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang modern dan berkelanjutan seperti pelabuhan perikanan, balai benih perikanan
 10. Ekstensifikasi dan Intensifikasi usaha dan industri Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
 11. Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi kewenangan provinsi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan
 12. Peningkatan kelembagaan petani, peternak dan kelompok nelayan dan sistem pengawasan mutu serta perbaikan pola distribusi.
 13. Peningkatan kualitas produksi pertanian melalui riset dan pengembangan khususnya terkait benih yang bersesuaian dengan iklim lokal
- 3) Strategi ketiga yaitu Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dilakukan melalui kebijakan:
1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pariwisata seperti Botumoitto, Minanga, Geosite dalam Geopark Gorontalo dan kawasan pariwisata prioritas provinsi seperti Olele, Lombongo dan hiu paus Botubarani.
 2. Peningkatan nilai tambah melalui penerapan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
 3. Peningkatan kapasitas dan jejaring pengelolaan wisata yang berbasis konsep pemberdayaan masyarakat lokal, baik dari aspek kerjasama prasarana dan sarana pendukung, manajemen dan jejaring kerjasama kelembagaan antar wilayah dan antar daerah
 4. Pembangunan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis riset dan inovasi untuk pengembangan lapangan kerja yang didukung oleh pendidikan vokasi
 5. Peningkatan kualitas dan promosi pariwisata, baik melalui pemanfaatan teknologi maupun kolaborasi dan intensitas event kreatif untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal di Gorontalo.
- 4) Strategi keempat yaitu Peningkatan perekonomian daerah melalui pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam secara berkelanjutan yang akan dilakukan melalui kebijakan :
1. Pemetaan dan identifikasi potensi pertambangan energi dan sumber daya mineral setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo dalam bentuk kajian penelitian dan

- roadmap pengembangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan mendepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.
 3. Perumusan dan arahan kebijakan pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan melalui pembangunan kawasan pengelolaan hilirisasi dan industri pengolahan sehingga dapat berafiliasi untuk mendorong kawasan industri dan hilirisasi produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.
 4. Pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam yang diarahkan untuk mempercepat terbukanya aksesibilitas dan moda transportasi wilayah serta mendorong terbukanya kawasan pusat pertumbuhan baru.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator dan Target Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	%	8,12	0,39	0,41
2	- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	%	0,62	0,64	0,68
3	- Rasio Kewirausahaan Provinsi	Rasio	3,38	1,44	3,83
4	- Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio	0,8	0,40	0,98
5	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,08	3,23	3,01-3,26
6	- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	35	38,86	40
7	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,11	55,65	56,50
8	- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	2,29	4,14	4,56
9	- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)	Ribuan Orang	4,0	5.294	5.400
10	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Bintang	%	56,59	51,70	53,48
11	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Non-Bintang	%	17,14	18,27	18,54
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	4,39	4,89	5,29
13	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	28,88	29,59	29,88

4.4.3. Sasaran terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air

Strategi yang dilakukan adalah penguatan kemandirian pangan dan ketahanan energi dan air. Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air melalui perluasan jaringan primer, sekunder dan tersier.
2. Peningkatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan derajat kesehatan.
3. Pengembangan *natural based solution* seperti hutan bakau, pengembangan dan perluasan ruang terbuka hijau, biopori alami untuk pengendalian banjir.
4. Pemenuhan air baku dalam rangka ketahanan air seperti pembangunan kolam- kolam retensi dan bendung.
5. Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi.
6. Meningkatkan ketersediaan energi baru terbarukan seperti PLTMH, PLTS, Biogas dgn memperhatikan potensi dan daya dukung lingkungan
7. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu *Food, Energy-Water (FEW) Nexus*
8. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran kualitas air dan menjaga kelestarian alam beserta ekosistemnya.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.7
Indikator dan Target Sasaran 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Konsumsi Listrik per kapita (KWH)	KWH	1.100	780	833
2	Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	SBM/Rp Milyar	72	72 (2024)	70
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Nilai	13,57	15,32	15,01
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	38,33	38,33 (2024)	42

4.4.4. Sasaran terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan /kemandirian daerah

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi peningkatan upaya extensifikasi dan intensifikasi Pendapatan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui extensifikasi dan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
2. Pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), pendanaan *Filantrophy*, jasa ekosistem pasar karbon, serta pembiayaan alternative lainnya.
3. Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan serta optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).

4. Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional untuk menstimulasi dukungan penganggaran lebih dari pemerintah pusat.
5. Penguatan pengendalian serapan anggaran kegiatan pemerintah untuk mempercepat pemanfaatannya bagi perputaran ekonomi serta menjadi prestasi sebagai salah satu potensi tambahan anggaran apresiasi dari pemerintah pusat.
6. Penguatan potensi PAD melalui optimalisasi sumber- sumber pendapatan baru, baik Labkesda, Insenerator serta beberapa fasilitas potensi PAD lainnya

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator dan Target Sasaran 4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,80%	0,73	0,81
2	Tingkat Inflasi (%)	%	2,87	2,52	2,4 – 2,8
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	12,25%	12,25 (2024)	13,10
4	Nilai Transaksi Saham Perkapita (Rp)	Rp	572,88.06	572.880 (2024)	694,557
5	Total Kredit/PDRB (%)	%	38,55	38,55 (2024)	34,15
6	Indeks Inklusi Keuangan	%	90,4	90,4 (2024)	92,2

4.4.5. Sasaran Menciptakan kondusifitas, stabilitas, kemanan, ketertiban daerah dan demokrasi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Penguatan koordinasi dan komitmen kerjasama serta gotong royong melalui kearifan lokal seperti “Mohuyula” dalam menjaga **stabilitas**, keamanan dan ketertiban daerah.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Koordinasi dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi, cegah dini pada masyarakat untuk menjamin stabilitas politik
2. Penguatan pengawasan ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat.
3. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.
5. Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperkuat nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan inklusivitas serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila.
6. Penguatan ruang dialog antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik sosial.
7. Mendorong peningkatan pengawasan keamanan di wilayah laut dengan pemanfaatan teknologi.
8. Optimalisasi pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.9
Indikator dan Target Sasaran 5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	59,39	51,72	53,79

4.4.6. Sasaran Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif

Strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Strategi pertama adalah Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif, dengan kebijakan:
1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif

2. Pendekatan pemanfaatan satu data tunggal sosial ekonomi sebagai *baseline* data sasaran penerima manfaat

3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas.

4. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia

5. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- 2) Strategi kedua yaitu kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui perencanaan, pendanaan, dan intervensi yang sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan kebijakan :
1. Penguatan fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah

2. Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi melalui penguatan komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pendanaan dan penentuan sasaran intervensi program

3. Pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah

4. Memperkuat evaluasi rencana APBD Kabupaten/Kota dalam mendukung sinergi pembangunan
- 3) Strategi ketiga yaitu Pemenuhan akses hunian layak dan penanganan pemukiman kumuh, dengan arah kebijakan:
1. Penyediaan akses perumahan layak, terjangkau, dan berkualitas untuk masyarakat miskin

2. Penanganan kawasan kumuh

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.10
Indikator dan Target Sasaran 6

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	56,55	53,77	68
2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	15	15 (2024)	17

4.4.7. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penguatan Sistem Kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah:

1. Penguatan dan pengembangan upaya promosi kesehatan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
3. Percepatan penurunan stunting dan percepatan eliminasi penyakit tidak menular dan menular seperti HIV AIDS, tuberkolosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multisektor.
4. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), khususnya untuk daerah kepulauan dan daerah terpencil dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam.
5. Peningkatan sarana dan prasana rumah sakit
6. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan termasuk pengembangan kompetensi
7. Pengembangan dan pengolahan sistem air limbah.
8. Penguatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan pemenuhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
9. Peningkatan layanan kesehatan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kesehatan

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.9
Indikator dan Target Sasaran 7

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,06	71,96
2	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	189,00	150,7	124
3	Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	24,46	23,8	19,74
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	95,00	88	90
5	*)Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	93,18	88	90

6	**)Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,50	95,3	89
---	---	---	-------	------	----

Catatan :
*)Berdasarkan surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD dan Renstra OPD
**)Perubahan kebijakan penyelenggaraan Program Bantuan Iuran di Tingkat Nasional

4.4.8. Sasaran Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah khususnya pada usia pendidikan menengah atas melalui intervensi dan stimulasi sarana dan fasilitas
3. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar daerah
4. Penguatan kualitas dan manajemen pendidikan vokasi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah
5. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
6. Penyediaan dan peningkatan akses Pendidikan khususnya di wilayah terisolir dan rawan putus sekolah
7. Penyediaan dan peningkatan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB)
8. Peningkatan kualitas literasi masyarakat
9. Dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Memberi Makan Bergizi Gratis

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.12
Indikator dan Target Sasaran 8

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional:				
	- Literasi Membaca	%	0,00 – 16,67	16,67-26,67	26,67-36,67
	- Numerasi	%	0,00 – 16,67	16,67-26,67	26,67-36,67
2	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk:				
	- Literasi Membaca	%	21,73 – 23,73	56-59	56-59
	- Numerasi	%	14,93 – 16,93	51-53	51-53
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,23 %	12,09%	12,37%
4	Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	8,3	8,4	8,5
5	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,17	13,20	13,22

4.4.9. Sasaran terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah

Kebijakan ini akan dicapai melalui strategi pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya dengan arah kebijakan :

1. Pemetaan dan intervensi pelestarian potensi warisan budaya melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.
2. Penguatan pendidikan yang berbasis pembentukan kepribadian yang dikembangkan dan didukung oleh kegiatan kelembagaan non formal masyarakat dengan mengedepankan toleransi kerukunan antar etnis dan agama.
3. Dukungan terhadap pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan.
4. Pengembangan pendidikan karakter sejak dini dengan melestarikan budaya kearifan lokal dan kontrol sosial yang kuat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
5. Penguatan modal sosial, kearifan lokal dan warisan budaya berlandaskan falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah sebagai bagian perwujudan Gorontalo Serambi Madinah.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.13
Indikator dan Target Sasaran 9

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	72,71	77,49	77,74

4.4.10. Sasaran meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif

Sasaran ini akan dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu :

- 1) Strategi pertama adalah Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah. Strategi ini akan dicapai dengan kebijakan antara lain :
 1. Peningkatan peran keluarga untuk mendukung penguatan moral generasi sejak dini
 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
 3. Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi sebagai penopang ketahanan ekonomi skala lingkungan keluarga,
- 2) Strategi kedua yaitu Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan kebijakan pembangunan antara lain :
1. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda melalui partisipasi organisasi kemasyarakatan, penyaluran minat dan kreativitas event seni dan olahraga serta stimulasi menyampaikan gagasan dalam forum formal dan nonformal.

2. Pengembangan sistem pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan usia dini formal maupun partisipasi club dan komunitas dalam lingkungan masyarakat

3. Stimulasi pengembangan kapasitas pribadi dan kelembagaan pemuda melalui kompetisi formal dan non formal

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.14
Indikator dan Target Sasaran 10

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,36	0,343	0,32
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	78,03	78,03	81,03
3	Jumlah perolehan medali pada Kompetisi Nasional	Jumlah	13	20	*)8

*) Sesuai jumlah even yang diikuti

4.4.11. Sasaran Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

- (1) Strategi pertama yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan kebijakan:
1. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.

2. Peningkatan Pengelolaan sampah dan limbah B3 berbasis teknologi.

3. Pemenuhan dan penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

4. Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan publik di sektor air minum dan persampahan sebagai salah satu kebutuhan utama dari dampak perkembangan kota.
- (2) Strategi kedua untuk pencapaian sasaran ini, yakni peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan serta Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:
1. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas masyarakat yang mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, berkesesuaian iklim dan inklusif

2.

Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim dan ramah lingkungan.
3.

Pengelolaan kawasan pertanian yang ramah lingkungan.
4.

Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
5.

Pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi
6.

Pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.
7.

Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
8.

Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan Masyarakat.
9.

Pengelolaan hutan di luar kawasan hutan negara dan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan.
10.

Pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kehutanan.
11.

Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.15
Indikator dan Target Sasaran 11

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target
			2025	2026
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	164,37	159,94
2	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	- Kumulatif	%	21,05 (2024)	21,80
	- Tahunan	%	33,70 (2024)	37,10
3	Pengelolaan Sampah			
	- Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	14 (2024)	20
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	23 (2024)	28
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,28 (2024)	5,09
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,524 (2024)	0,527

4.4.12. Sasaran terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Strategi yang akan dilaksanakan yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan,

kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimasi, harmonisasi dan peningkatan layanan produk hukum dan kualitas produk hukum daerah.
2. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan Pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah serta pengawasan pembangunan daerah.
3. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah serta
4. penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI).
5. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kompetensi SDM.
6. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung kinerja kualitas pelayanan publik.
7. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
8. Peningkatan kualitas dan managemen ASN berbasis sistem merit.
9. Peningkatan kepatuhan penyelenggaraan manajemen kearsipan
10. Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah dan mendorong pembinaan ke pemerintah kabupaten dan kota. melalui Penerapan model pendekatan koersif atau model normatif-reedukatif
11. Penguatan kajian kebijakan, riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah.
12. Peningkatan kualitas pengendalian ekonomi dan pembangunan
13. Penguatan kerjasama pembangunan nasional dan internasional.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.16
Indikator dan Target Sasaran 12

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
			2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,82	87	88
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,04	4,12	4,18
3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	34,68	40,	40,7

4.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan

yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.17
Program Prioritas Provinsi Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Tujuan : Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	
	Sasaran : Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Kominfo dan Statistik
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
4	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas PUPRPRKP
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas PUPRPRKP
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas PUPRPRKP
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PUPRPRKP
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas PUPRPRKP
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas PUPRPRKP
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPRPRKP
13	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas PUPRPRKP
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas PUPRPRKP
16	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
19	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
20	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas PUPRPRKP
22	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas PUPRPRKP
23	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas PUPRPRKP
24	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Dinas PUPRPRKP
	Sasaran : Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura

		Dinas Peternakan dan Perkebunan
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dinas Peternakan dan Perkebunan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
11	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
13	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
14	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Perkebunan
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
18	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
20	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
21	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
22	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
24	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
Sasaran : Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUPRPRKP

6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUPRPRKP
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran : Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah		
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran : Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah		
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol
3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol
Tujuan : Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan		
Sasaran : Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif		
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas PUPRPRKP
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas PUPRPRKP
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
9	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
11	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
12	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Tujuan : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (RSUD Hasri Ainun Habibie)
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
Sasaran : Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra)
Sasaran : Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		

1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
9	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas PUPRPRKP (UPTD TPA Talumelito)
2	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN PERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPRPRKP
16	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
17	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi

Tujuan : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		
Sasaran : Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian		
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapppeda
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapppeda
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bapppeda
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo dan Statistik
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo dan Statistik
7	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo dan Statistik
8	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BKPSDM
13	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
15	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
17	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Sosial , Kependudukan dan Catatan Sipil
18	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
19	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
20	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi Setda
21	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Biro Pemerintahan dan Kesra Setda
22	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
23	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
24	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Pengadaan Setda
25	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung

Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program prioritas daerah

terhadap prioritas nasional Tahun 2026, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 mengusung Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** menjadi fondasi Awal untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan berpedoman pada RPJP Nasional dengan RPJMN dengan sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk Peningkatkan Produktivitas, Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional untuk Provinsi Gorontalo sebagai sebagai berikut:

Tabel 4.18

Prioritas Nasional untuk Provinsi Gorontalo 2026

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen subsektor tanaman pangan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan sarana produksi usaha perikanan yang disalurkan ke masyarakat
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan jagung berkelanjutan
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan aneka cabai di lima kabupaten
	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi business matchmaking startup digital
	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi digital technopreneur
	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian

	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana pengendali daya rusak air di Sungai Bolango
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
<p>Prioritas Nasional 3:</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
<p>Prioritas Nasional 4:</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Penurunan kematian ibu dan bayi Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sederajat <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi literasi digital
	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kematian ibu dan bayi
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sederajat
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi literasi digital
<p>Prioritas Nasional 5:</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah, dan global
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
<p>Prioritas Nasional 6:</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mendukung pemerataan ekonomi

kemiskinan	
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan rumah susun pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone Bolango
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan rumah susun pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone Bolango
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

** Highlight Indikasi Intervensi akan menyesuaikan dengan hasil pembahasan dan penetapan RKP 2026*

Berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2026, dilaksanakan penyelarasan program prioritas RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dengan Prioritas RKP Tahun 2026 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.19
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan RKP dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 beserta dukungan Program Prioritas Tahun 2026

No	Prioritas RKP	Sasaran RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2026
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

			<div> <div>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</div> <div>4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</div> <div>5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</div> <div>6. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</div> <div>7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</div> <div>8. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</div> </div>
			<div> <div>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</div> <div>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</div> <div>3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</div> <div>4. Program Penyelenggaraan Pengawasan</div> <div>5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</div> <div>6. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik</div> <div>7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</div> <div>8. Program Pengelolaan Arsip</div> <div>9. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</div> <div>10. Program pengembangan Sumberdaya Manusia</div> <div>11. Program Penataan Desa</div> <div>12. Program Peningkatan Kerjasama Desa</div> <div>13. Program Administrasi</div> </div>

			<div>Pemerintahan Desa</div> <div> <div>14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</div> <div>15. Program Pendaftaran Penduduk</div> <div>16. Program Pencatatan Sipil</div> <div>17. Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan</div> <div>18. Program Kepegawaian Daerah</div> <div>19. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</div> <div>20. Program Penataan Organisasi</div> <div>21. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</div> <div>22. Program kebijakan administrasi Pembangunan</div> <div>23. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa</div> <div>24. Program Pelayanan Penghubung</div> </div>
2.	<div>Prioritas Nasional 2:</div> <div>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</div>	<div>Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah</div>	<div> <div>1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</div> <div>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</div> <div>3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</div> <div>4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</div> <div>5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</div> <div>6. Program Pengembangan Ekspor</div> <div>7.</div> <div>8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</div> <div>9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</div> <div>10. Program Penempatan Tenaga Kerja</div> <div>11. Program Hubungan Industrial</div> </div>

			<div>12. Program Pengawasan Ketenagakerjaan</div> <div>13. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil</div> <div>14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</div> <div>15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</div> <div>16. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</div> <div>17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</div> <div>18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)</div> <div>19. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)</div> <div>20. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)</div> <div>21. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)</div> <div>22. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)</div> <div>23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</div> <div>24. Program Promosi Penanaman Modal</div> <div>25. Program Pelayanan Penanaman Modal</div> <div>26. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</div> <div>27. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</div> <div>28. Program Pemasaran Pariwisata</div>
		<div>Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air</div>	<div>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</div> <div>2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</div> <div>3. Program Peningkatan</div>

			<div>Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</div> <div>4. Program Penanganan Kerawanan Pangan</div> <div>5. Program Pengawasan Keamanan Pangan</div> <div>6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</div> <div>7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</div> <div>8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</div> <div>9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</div> <div>10. Program Penyuluhan Pertanian</div> <div>11. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</div> <div>12. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</div> <div>13. Program Pengelolaan Energi baru Terbarukan</div> <div>14. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</div> <div>15. Program Pengelolaan Energi Terbarukan</div>
3.	<div>Prioritas Nasional 3:</div> <div>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</div>	<div>Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan</div>	<div>1. Program Pengembangan Permukiman</div> <div>2. Program Penataan Bangunan Gedung</div> <div>3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</div> <div>4. Program Penyelenggaraan Jalan</div> <div>5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</div> <div>6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</div> <div>7. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</div> <div>8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah</div>

			<p>untuk Pembangunan</p> <p>9. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan</p> <p>10. Program Pengembangan Perumahan</p> <p>11. Program Kawasan Permukiman</p> <p>12. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p> <p>13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>14. Program Pengelolaan Pelayaran</p> <p>15. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>16. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>17. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi</p> <p>18. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</p> <p>19. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>20. Program Pengembangan UMKM</p> <p>21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
4.	<p>Prioritas Nasional 4:</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p>	<p>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan</p>	<p>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>4. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan</p>

			<p>Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p>
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	<p>1. Program pengelolaan pendidikan</p> <p>2. Program Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Program pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>4. Program pengendalian perizinan pendidikan</p> <p>5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</p> <p>6. Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>7. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</p> <p>8. Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>9. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>
		Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	<p>1. Program Perlindungan Perempuan</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas keluarga</p> <p>3. Program Perlindungan Khusus Anak</p> <p>4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p>

			8. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
5.	<p>Prioritas Nasional 5:</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>	<p>Peningkatan industri hulu hilir, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, ekspor, pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 6. Program Pengembangan Ekspor 7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 9. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 10. Program Promosi Penanaman Modal 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 13. Progran Penempatan Tenaga Kerja 14. Program Hubungan Industrial 15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 16. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
6.	<p>Prioritas Nasional 6:</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>	<p>Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan

			<div>Jaminan Sosial</div> <div>5. Program Penanganan Bencana</div> <div>6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</div> <div>7. Program Pengendalian Penduduk</div> <div>8. Program Pembinaan Keluarga Berencana</div> <div>9. Program Administrasi Pemerintahan Desa</div> <div>10. Program Peningkatan Kerjasama Desa</div> <div>11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</div>
7	<div>Prioritas Nasional 7:</div> <div>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</div>	<div>Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi</div>	<div>1. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</div> <div>2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</div> <div>3. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</div> <div>4. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</div> <div>5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</div> <div>6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</div> <div>8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</div> <div>9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</div> <div>10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</div>

			<div>11. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</div> <div>12. Program Penyelenggaraan Pengawasan</div> <div>13. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</div> <div>14. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa</div> <div>15. Program perekonomian dan pembangunan</div> <div>16. Program kebijakan administrasi pembangunan</div> <div>17. Program Penataan Organisasi</div> <div>18. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum</div> <div>19. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</div> <div>20. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</div> <div>21. Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi</div> <div>22. Program Pelayanan Penghubung</div> <div>23. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</div> <div>24. Program Pengelolaan Arsip</div> <div>25. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</div>
		Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah	<div>1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</div> <div>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</div> <div>4. Program perekonomian dan pembangunan</div>
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	<div>1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</div> <div>2. Program Perencanaan Hutan</div> <div>3. Program Pengelolaan Hutan</div> <div>4. Program Konservasi SDA Hayati</div>

	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		<p>dan Ekosistemnya</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Program Pengelolaan DAS Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Peracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penanggulangan Bencana
		Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan

			Permuseuman
--	--	--	-------------

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2026. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2026.

Adapun untuk Perubahan RKPD Tahun 2026, rencana kerja secara prinsip masih konsisten dengan RKPD Induk Tahun 2026, namun terdapat beberapa perubahan pada pendanaannya. Hal ini adalah dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran di perangkat daerah yang dirasa butuh untuk dilakukan, serta usulan tambahan yang dapat didanai berdasarkan kemampuan keuangan daerah melalui pemanfaatan SiLPA Tahun 2025 dan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan perhitungan kembali atas realisasi sampai dengan semester I Tahun 2026.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah. Adapun pendanaan alokasi anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2026 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rekapitulasi Perbandingan Pagu Indikatif OPD Tahun 2026

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	508.296.567.011	534.804.246.881	537.364.142.482
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD Museum			
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76.126.336.408	76.766.194.885	80.422.716.485
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	80.667.407.807	143.517.711.968	160.961.770.600

5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.580.995.509	2.355.578.316	2.783.578.316
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.997.194.690	64.668.069.730	87.682.505.805
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan	1.213.704.000	1.177.161.000	1.338.161.000
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	UPTD TPA Talumelito	2.584.101.310	2.550.539.810	3.276.539.810
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	10.631.220.615	10.038.742.027	10.951.862.108
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.897.696.689	9.112.696.689	11.508.796.689
11	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.037.500.000	21.266.289.112	22.370.640.169
12	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	17.910.940.000	16.205.767.961	17.492.058.694
13	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas	330.000.000	230.600.200	279.596.200
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.000.000.000	11.818.151.439	12.877.652.439
15	Dinas Ketahanan Pangan,	Balai Pengawasan Mutu dan	306.676.037	306.676.179	306.676.179

	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Keamanan Pangan			
16	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	12.033.763.963	51.201.027.116	54.479.322.116
17	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		68.975.000	68.975.000
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian		1.453.508.500	1.453.508.500
19	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian		1.250.148.900	1.250.633.577
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian		404.954.500	404.954.500
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.045.872.828	28.710.714.403	32.020.069.879
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat	248.554.012	832.324.000	1.398.004.000
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD KPH Wilayah III Pohuwato	205.566.006	803.936.000	1.353.246.000
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara	228.867.009	828.107.886	1.427.475.886
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD KPH Wilayah V Boalemo	510.285.282	1.290.650.270	1.850.518.270
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo	770.384.156	1.788.119.150	2.498.785.150
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo	215.630.444	883.355.935	1.480.709.935

28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.000.000.000	-	-
29	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	11.632.432.353	16.501.730.499	13.225.986.499
30	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	14.000.000.000	12.970.800.814	15.009.295.814
31	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	21.852.432.675	26.421.418.775	32.247.706.625
32	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	329.462.325	75.954.325	75.954.325
33	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.571.760.002	7.508.778.592	8.390.778.592
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.427.420.000	-	-
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.752.131.872	8.827.269.238	10.190.269.238
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.982.178.019	20.602.084.637	22.552.067.137
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)	895.194.944	675.580.868	744.625.868
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)	1.585.279.849	1.505.218.856	1.546.151.156
39	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)	738.861.146	926.121.665	938.121.665
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma (PPI Gentuma)	520.427.545	404.009.000	421.646.500
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)	347.883.492	275.513.400	307.513.400
42	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga	11.340.000.000	18.754.521.683	20.561.761.133

43	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	58.551.036.050	-	-
44	Dinas Pertanian	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	1.419.881.650		
45	Dinas Pertanian	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	1.163.596.800		
46	Dinas Pertanian	UPTD Laboratorium Veteriner	516.838.100		
47	Dinas Pertanian	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	380.924.400		
48	Dinas Pertanian	UPTD Balai Perbibitan Ternak	2.762.033.000		
49	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Dinas Peternakan dan Perkebunan		15.222.797.622	16.235.044.954
50	Dinas Peternakan dan Perkebunan	UPTD Laboratorium Veteriner		531.089.700	587.089.700
51	Dinas Peternakan dan Perkebunan	UPTD Balai Perbibitan Ternak		2.818.470.600	2.824.471.268
52	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah			
53	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.883.098.695	19.336.046.102	24.762.856.102
54	Sekretariat Daerah	Biro Hukum	6.000.000.000	4.570.998.794	4.901.849.085
55	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5.000.000.000	4.513.082.395	4.889.153.824
56	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7.616.521.128	6.834.177.951	7.345.617.951
57	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi	5.500.000.000	4.582.284.112	4.862.284.112
58	Sekretariat Daerah	Biro Umum	43.000.000.000	38.544.518.193	43.871.990.004
59	Badan Penghubung	Badan Penghubung	7.500.000.000	7.408.500.000	8.214.700.593
60	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	74.207.114.187	83.609.985.816	98.909.985.816
61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.158.856.089	15.451.266.269	16.905.666.269
62	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah		38.108.398.341	39.090.379.599
63	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo		1.417.624.591	1.471.660.381

64	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo		1.463.598.400	1.463.598.400
65	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo		940.234.141	951.668.761
66	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango		919.745.009	919.745.009
67	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara		1.128.069.800	1.128.069.800
68	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato		1.252.350.132	1.252.350.132
69	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	261.757.141.780	224.525.488.990	269.707.062.328
70	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo	1.447.331.539	-	-
71	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	1.484.623.804	-	-
72	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo	948.915.685	-	-
73	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango	935.208.869	-	-
74	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	1.182.110.800	-	-
75	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato	1.267.813.992	-	-
76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.617.500.000	19.583.978.136	20.632.015.714

RKPD Perubahan		PROVINSI GORONTALO 2026			
77	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.000.000.000		
78	Inspektorat	Inspektorat	22.700.000.000	18.802.137.449	20.511.437.449
79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.741.000.000	9.958.571.429	11.622.051.421
TOTAL			1.546.556.274.566	1.621.306.664.181	1.778.575.526.413

Selanjutnya untuk alokasi anggaran berdasarkan perangkat daerah, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel 5.2 di bawah ini :